

**MEDIA WATCH DI ERA REFORMASI (1999-2014)**  
**MENGONTROL ISI MEDIA MASSA DI INDONESIA**



Handoko Fincensius  
4415122371

Skripsi ini ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**2018**

## LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Handoko Fincensius

NIM : 4415122371

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa dalam skripsi dengan judul *“MEDIA WATCH DI ERA REFORMASI (1999-2014): MENGONTROL ISI MEDIA MASSA DI INDONESIA”*, merupakan benar-benar karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

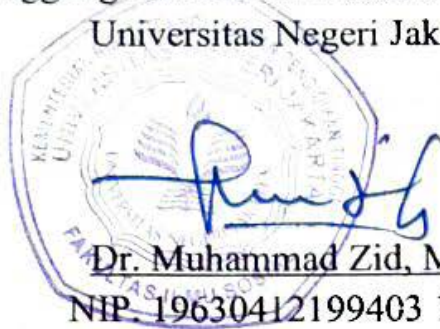
Jakarta, Februari 2018



  
ko Fincensius





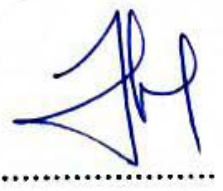
## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si  
NIP. 19630412199403 1 002

### TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Nur'aeni Marta, S.S.,M.Hum NIP. 19710922200112 2 001 Ketua		20-2-2018 .....
2.	Sri Martini, S.S.,M.Hum NIP. 19720324199903 2 001 Sekretaris		20-2-2018 .....
3.	Dra. Ratu Husmiati, M.Hum NIP. 19630707199003 2 002 Penguji Ahli		16-2-2018 .....
4.	Dr. Abdul Syukur, M.Hum NIP. 19691010200501 1 002 Pembimbing I		20-2-2018 .....
5.	Humaidi, M.Hum NIP. 19811219200812 1 001 Pembimbing II		21-2-2018 .....

Tanggal Lulus : 9 Februari 2018

## ABSTRACT

**Handoko Fincensius**, Media Watch In The Reform Era (1999-2014): Control The Content Of Mass Media In Indonesia. Essay. History Education Program, Faculty of Social Sciences, State University Of Jakarta, 2018.

Press has a great role in the journey and the development of nation and state in Indonesia. Also, Press is the fourth pillar of democracy which is one of its functions that is controlling other institutions such as Executive, Legislative, Judiciary and other government agencies for the benefit of society. The history of the Indonesian press noted that the development of the press in Indonesia is influenced by the system of government that is being held by the holder of power.

During the New Order under Suharto's leadership, the government created several laws and regulations that curbed the press in such a way. One of the regulations is the Press Publishing Business License. After the fall of Soeharto, Indonesia entered the Reform Era which put forward the democratization of all fields including the press.

press in the Reform era after released from the New Order regime that restricts the press, it turns out for some peoples that the freedom of the press is felt 'excessive'. The condition of 'excessive' press freedom, made the observers of the press established media monitoring institutions or often called media watch. Media watch is a non-governmental organization that oversees news coverage of the press so as not to get out of the way of its function as a watchdog (social control).

This research aims to describe the development of the press in the Reform era and the influence of media watch on the press in Indonesia from 1999 to 2014. The focus of this research is how media watch influence the content of mass media in Indonesia.

**Keywords:** Press, Media Watch, Mass Media, Reform, Democracy



## ABSTRAK

**Handoko Fincensius**, *Media Watch Di Era Reformasi (1999-2014): Mengontrol Isi Media Massa Di Indonesia*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2018.

Pers memiliki peranan yang besar dalam perjalanan dan perkembangan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lalu, Pers juga merupakan pilar ke-4 demokrasi yang salah satu fungsinya yaitu mengontrol lembaga-lembaga lain seperti Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan lembaga pemerintah lainnya untuk kepentingan masyarakat. Sejarah pers Indonesia mencatat bahwa perkembangan pers di Indonesia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang dijalankan pemegang kekuasaan.

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, pemerintah menciptakan beberapa peraturan dan perundangan yang mengekang pers sedemikian rupa. Salah satunya ialah peraturan mengenai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Pasca lengsernya Soeharto, Indonesia memasuki era Reformasi yang mengedepankan demokratisasi segala bidang termasuk pada pers.

Pers di era Reformasi setelah lepas dari rezim Orde Baru yang mengekang pers, ternyata bagi beberapa kalangan kebebasan pers dirasakan sudah ‘kebablasan’. Kondisi kebebasan pers yang ‘kebablasan’, membuat para pemerhati pers mendirikan lembaga pemantau media atau sering disebut *media watch*. *Media watch* adalah lembaga atau organisasi non pemerintah yang mengawasi pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan khalayak pers agar tidak keluar jalur dari fungsinya sebagai *watchdog* (kontrol sosial).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan pers di era Reformasi dan pengaruh *media watch* terhadap pers di Indonesia sejak tahun 1999 hingga tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *media watch* terhadap isi pemberitaan media massa di Indonesia.

Kata Kunci : Pers, *Media Watch*, Media Massa, Reformasi, Demokrasi

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Even It’s Just A Spark But It’s Enough To Keep Me Going, Hope”. –Last Hope-*

Kita hanya penumpang di penerbangan ini dan kita hanya berkelana di kehidupan ini. Suatu saat akan sampai di tujuan kita, jadi berpeganganlah yang erat

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibuku *Elifa Aritonang*,

Dan kakak-kakakku *Harlas* dan *Hera* yang tercinta dan terkasih.

Ibuku yang sedari dulu membesarkan kami bertiga seorang diri, pengorbananmu tak akan terlupakan sepanjang hayatku.

Terima kasih atas segala do’a, motivasi, dan kasih sayang yang selalu menguatkan.

*Mauliate Ma Tu Debata*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Senandung dan pujian kemuliaan kepada Yesus Kristus atas berkat kudus yang diberikan kepada kita semua dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.

Selama proses penelitian sampai dengan proses penulisan, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Abdul Syukur, M.Hum. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
2. Dr. Abdul Syukur, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Humaidi, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu bersabar memberikan bimbingan, bantuan dan saran kepada peneliti selama proses penelitian dan penulisan skripsi.
3. Wisnubroto, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik peneliti dan seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Jakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk peneliti selama menyelesaikan perkuliahan.

4. Bapak dan Ibu karyawan Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, yang telah ramah dalam pelayanannya membantu peneliti mencari sumber-sumber.
5. Ibuku Elifa Aritonang dan kakak-kakakku Harlas dan Hera yang selalu memberikan motivasi, materi, doa yang tidak pernah terputus selama peneliti kuliah.
6. Sahabat sedari bangku SMK Byas, Dias, Reca, Ayum yang selalu mengingatkan peneliti untuk segera lulus. Sahabat seperjuangan selama kuliah hingga sekarang yang selalu memberikan kebahagiaan Eri, Bocil, Faizah, Mela, Vinda, Arum, Gita, Billa, Priska, Nana, Marchi, Wisnu, Tezar, Ksatria, Dede, Fahri. Sahabat 5 Kutu yang selalu siap berbagi suka dan duka Agung, Bagus, Isnan, Yudo.
7. Kawan-kawan dari Solidaritas Pemuda Rawamangun (Spora) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jakarta, di antaranya Ical, Kentung, Jati, Lele, Luqman, Rasyid, Kawiyu, Ilham, RPL, Aji, Lyman, Avrutz, Abay, Sere dan yang lainnya, terima kasih atas kebersekawanannya yang luar biasa.
8. Kawan-kawan dari Jurusan dan Fakultas lainnya yang telah memberikan warna pergaulan yang beragam kepada peneliti di Universitas Negeri Jakarta, Dewi, Fajri, Tompel, Citra, Soni, Dika, Najar, Fathia, Nurma, dan yang lainnya.

9. Seluruh mahasiswa/i Pendidikan Sejarah angkatan 2012 Terima kasih telah mau memberikan bantuan selama perkuliahan, sukses untuk kita semua.

Kepada semua yang telah mendukung, mendo'akan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini yang belum tersebut namanya dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga Allah membalas dan melimpahkan karunia-Nya, Aamiin.

Jakarta, Februari 2018

Handoko Fincensus



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Metode dan Sumber .....	7
<b>BAB II. PERS DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU .....</b>	<b>9</b>
A. Transisi Pers Orde Lama ke Pers Orde Baru .....	9
B. Sistem Pers Orde Baru .....	12
C. Undang-Undang Pers Pada Masa Orde Baru.....	16
D. Pembredelan Pers Pada Masa Orde Baru .....	19
<b>BAB III. PERUBAHAN WAJAH PERS DAN KEMUNCULAN</b>	
<b>MEDIA WATCH PADA AWAL ERA REFORMASI (1999-2004).....</b>	<b>22</b>
A. <i>Tempo</i> Menggugat dan Gerakan Reformasi Melengserkan Soeharto ..	22

B. Revisi Undang-Undang Pers Pada Era Reformasi .....	27
C. Kemunculan <i>Media Watch</i> di Indonesia Pada Tahun 1999 .....	31
D. Kebebasan Pers Yang Keablasan (1999-2004) .....	34
<b>BAB IV. DINAMIKA MEDIA WATCH MENGONTROL MEDIA</b>	
<b>MASSA DI INDONESIA (2004-2014) .....</b>	<b>40</b>
A. Pengawasan Pers Oleh <i>Media Watch</i> (Ragam Dan Metode) .....	40
B. Jurnalisme Kuning Menimbulkan Keresahan Publik .....	45
C. Pers Partisan Pada Pemilihan Umum Di Era Reformasi .....	49
D. Kondisi Pers di Indonesia Setelah Lima Belas Tahun Kemunculan Media Watch .....	52
<b>BAB V. KESIMPULAN .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. *Lampu Hijau* edisi Kamis 4 Juli 2013, “Denger Ortu Ribut Ama Tetangga Kakak-Adik Marah, Tetangga Dibacok”.
- Gambar 2. *Lampu Hijau* edisi sabtu 8 Februari 2014, “Cewek Dicegat 3 Cowok Ngaku Polisi, Si Cewek Dituduh Jadi Pengedar Sabu, Diseret Masuk Mobil, Diperkosa Marathon”.
- Gambar 3. Rekapitulasi data pers oleh Dewan Pers pada tahun 2010.
- Gambar 4. Rekapitulasi data pers oleh Dewan Pers pada tahun 2014.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.       Pendataan Pertumbuhan Pers Rentang Tahun 2010-2014

## DAFTAR ISTILAH

<i>Jurnalisme Kuning</i>	: Penerbitan pers yang memperbanyak materi informasi dan hiburan yang berbau seksual, sensasional, dan berselera rendah.
<i>Media Massa</i>	: Saluran atau sarana untuk memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan.
<i>Media Watch</i>	: Kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga masyarakat terhadap kinerja pers, terutama jika pemberitaan pers merugikan individu atau kelompok tertentu.
<i>Model Komunikasi Top-Down</i>	: Model Komunikasi yang bersifat satu arah sehingga arus informasinya bersifat monolog dari penguasa kepada rakyat.
<i>Pers</i>	: Lembaga kemasyarakatan di bidang jurnalistik (terdiri dari Pemimpin Umum, Redaksi, Wartawan, dan lain-lain) yang merupakan sumber informasi dan pasar ide dari aspirasi/opini masyarakat.
<i>Pers Pancasila</i>	: Pers yang sehat, bebas, dan bertanggung



jawab. Pers yang beorientasi, bersikap, dan bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

*Pers Partisan*

: Penerbitan pers yang isinya memprioritaskan satu partai politik karena kepemilikan modal suatu perusahaan pers dikuasai elit politik.

*Right to Express*

: Hak masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya terhadap suatu masalah yang ada.

*Right to Know*

: Hak masyarakat untuk mengetahui kejadian-kejadian di sekitarnya dan mendapatkan akses kepada informasi yang dibutuhkan.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |             |   |
|-------------|---|
| Lampiran 1. | Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers              |
| Lampiran 2. | Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran         |
| Lampiran 3. | Surat Edaran PWI mengenai Kode Etik Wartawan<br>Indonesia |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir pada tahun 1998, sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu era Reformasi.<sup>1</sup> Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden BJ. Habibie. Dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru, maka dimulailah penataan sistem kenegaraan menuju konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia.

Konsolidasi paling penting yaitu melakukan perubahan dan pergantian berbagai Peraturan dan Perundang-undangan yang dirasa tidak memberikan ruang gerak bagi kehidupan demokrasi.<sup>2</sup> Salah satunya adalah Pembentukan sistem dan perundangan tentang pers untuk melaksanakan kebebasan pers di Indonesia.

Franz Magnis-Suseno dalam bukunya yang berjudul ‘Mencari Sosok Demokrasi’ berpendapat bahwa:

Pemerintahan yang demokratis pada dasarnya berlangsung di bawah sorotan masyarakat dan alat penyorot utamanya adalah pers. Pers memberikan informasi serta segi-segi penilaian yang dibutuhkan masyarakat untuk membentuk pendapat terhadap pemerintah dan kehidupan politiknya.<sup>3</sup>

Sejarah pers Indonesia mencatat, pada masa Orde Baru (selanjutnya disingkat Orba) kehidupan pers di Indonesia dikekang pemerintah karena model

---

<sup>1</sup> perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia menuju ke arah kebebasan. Kehidupan bernegara dan bermasyarakat Indonesia yang sebelumnya dikekang oleh pemerintah otoriter. Otoriter artinya bahwa negara adalah ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli orang-perorangan dalam skala nilai, karena tanpa negara orang-perorangan tidak sanggup mengembangkan atribut-atribut manusia yang berbudaya. Teori otoritarian dalam buku Fred S. Siebert, *Empat Teori Pers*, (Jakarta; Intermasa, 1986), h. 10

<sup>2</sup> M. Nur Hasan, “*Tantangan Demokrasi di Indonesia*”, Jurnal Aspirasi Magister Ilmu Hukum Trisakti, XVI (1) Juli 2006, h. 33-40

<sup>3</sup> Franz Magnis-Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*, (Jakarta; Gramedia, 1995), h. 81

komunikasi yang digunakan adalah *top-down*.<sup>4</sup> Pemerintah Orba mengekang pers yang paling berperan banyak adalah kewajiban perusahaan pers memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (selanjutnya disingkat SIUPP) yang tertulis dalam Undang-undang (UU) No. 21/1982. Akhirnya tidak sedikit pers yang dibreidel oleh rezim Orba. Pers yang dibreidel terakhir kali yaitu majalah seperti *Tempo*, *Editor*, dan *DeTik* pada bulan juni 1994, karena beberapa berita yang dimuat dalam terbitan ketiga media tersebut dianggap dapat mengganggu stabilitas negara.<sup>5</sup>

Memasuki era Reformasi, beberapa kebijakan yang demokratis untuk pers disahkan pemerintah. Kebijakan yang menguntungkan pers terus berkembang sepanjang masa pemerintahan presiden B.J Habibie hingga presiden Abdurrahman Wahid (selanjutnya disingkat Gus Dur). Adapun kebijakan-kebijakan yang disahkan yaitu mencabut UU No. 21/1982 yang mengharuskan perusahaan pers memiliki SIUPP diganti dengan UU No. 40 tahun 1999.<sup>6</sup> Dalam UU No. 40/1999 tersebut juga meniadakan pengawasan dan campur tangan pemerintah terhadap penyelenggaraan pers.<sup>7</sup>

Perkembangannya pada era Reformasi, Kebijakan yang memberikan kebebasan pers digunakan dengan tidak baik dan tidak sehat oleh khalayak pers, sehingga membuat kalangan elit seperti Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri

---

<sup>4</sup> Abdul Muis (1998), “*Reformasi Budaya Komunikasi Politik*”, dalam Musa Kazhim, *Menuju Indonesia Baru; Menggagas Reformasi Total*, (Bandung; Pustaka Hidayah, 1998), h. 173-177

<sup>5</sup> Frans Magnis-Suseno, Loc.cit.

<sup>6</sup> St Sularto, *Humanisme dan Kebebasan Pers : Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*, ( Jakarta; Kompas, 2001), h. 99

<sup>7</sup> Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 2 yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, Edi Susanto. *Hukum Pers di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 38

menilai pers Indonesia sudah kelewatan. Istilah “kebablasan pers” diberikan kepada pers Indonesia pada awal era Reformasi. Hal tersebut dikarenakan banyak pemberitaan di media massa yang dinilai berlebihan, tendensius dan tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.<sup>8</sup> Dikenal dengan istilah Jurnaslime Kuning. Lalu, corak pers partisan kembali muncul pada masa Reformasi.

Penjabaran dalam UU No. 40/1999, pengawasan pers bukan lagi kewenangan pemerintah melainkan diberikan kepada masyarakat. Pengawasan pers yang merupakan kewenangan masyarakat dalam penjabaran UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers pada pasal 17, menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan, kegiatan tersebut berupa memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.<sup>9</sup> Undang-undang tersebut memberikan peluang kepada masyarakat mendirikan sebuah lembaga/organisasi yang mengawasi kegiatan pers di Indonesia.

Sesuai dalam UU No. 40/1999 tentang pers pasal 17, Lembaga pemantau media atau *media watch* adalah bentuk perwujudan dari kewenangan masyarakat dalam mengawasi perkembangan kemerdekaan pers dan menjamin memperoleh hak informasi yang diperlukan. Akan tetapi, kemunculan *media watch* merupakan produk Reformasi yang tidak populer,<sup>10</sup> ketika situasi pers di Indonesia diwarnai

---

<sup>8</sup> Lihat UU No. 40/1999 tentang pers pada pasal 7 ayat 2, menjelaskan bahwa wartawan dalam melakukan profesinya memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik yang disepakati organisasi-organisasi wartawan yang diterbitkan oleh Dewan Pers,

<sup>9</sup> Satrio Saptohadi, “Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia” dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011. h. 124

<sup>10</sup> St. Sularto, *Humanisme dan Kebebasan Pers*, h. 134



semangat kebebasan pers yang telah lepas dari rezim Orba. Keberadaan *media watch* di era reformasi dianggap sebagai ancaman, bentuk baru dari badan sensor di era reformasi.<sup>11</sup>

*Media watch* pertama yang hadir di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Pers (selanjutnya disingkat YLKP) pada maret 1999 di Surabaya.<sup>12</sup> Seterusnya bermunculan yang lainnya seperti Media Watch The Habibie Center Selanjutnya disingkat Media Watch THC) di Jakarta, Kajian Informasi Pendidikan, dan Penerbitan Sumatera (selanjutnya disingkat KIPPAS) di Sumatera, Remotivi di Jakarta dan lain-lain.

Peranan *media watch* seperti YLKP, Media Watch The Habibie Center, KIPPAS dan Remotivi dari hasil pemantauan mereka terhadap pers salah satunya dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal untuk memberi masukan kepada masyarakat sebagai konsumen dalam memilih surat kabar yang konten isi beritanya menarik dan berkualitas. Sedangkan, untuk pengelola media massa kajian-kajian yang diterbitkan *media watch* juga dapat dijadikan masukan yang baik untuk memperbaiki kualitas berita media yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Tulisan mengenai *media watch* sebagai kajian utama dalam membahas pers Indonesia pada masa reformasi sedikit yang membahas mengenai kemunculan dan perkembangannya pada masa Reformasi. *Media watch* dibahas hanya sebagai topik sekunder dalam beberapa kajian mengenai pers Indonesia. *Pertama*, dalam tulisan karya Abdul Muis “*Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers Untuk Budaya Komunikasi Politik*”, *media watch* dibahas hanya

---

<sup>11</sup> Ibid. h. 139-141

<sup>12</sup> <https://www.indonesiamediawatch.wordpress.com/profile/> (27 November 2016)

<sup>13</sup> Op.cit. St. Sularto. h. 116

sekilas. *Kedua*, dalam buku “*Humanisme dan Kebebasan Pers : Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*” Editor ST. Sularto, pembahasan mengenai topik *media watch* juga ditulis sedikit.

Mengetahui banyaknya buku, penelitian, dan kajian lainnya mengenai sejarah pers Indonesia yang sedikit membahas mengenai *media watch*, penelitian yang akan dilakukan ini akan terfokus membahas sejarah kemunculannya *media watch*, peran dan pengaruh kemunculannya di era reformasi, serta masalah-masalah yang muncul akibat keberadaan *media watch* dalam kehidupan pers Indonesia.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan dasar pemikiran dan judul penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini secara temporal dari tahun 1999-2004, saat periode awal Reformasi saat kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan kemunculan *media watch* di Indonesia. Lalu, dilanjutkan dengan periode 2004-2014 dengan memilih Tema pengaruh *media watch* terhadap kehadiran Jurnalisme Kuning dan Pers Partisan di era Reformasi.

Ruang lingkup spasialnya adalah Jakarta sebagai pusat peredaran arus informasi di Indonesia.

### **2. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- A. Apa Fungsi *media watch* di era Reformasi ?
- B. Bagaimana Sistem dan Praktek Pengawasan *media watch* pada media massa ?
- C. Mengapa Kemunculan *media watch* tidak disenangi dan bahkan tidak dikenal keberadaannya oleh masyarakat ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan kronologi kemunculan *media watch* dan pengaruh *media watch* terhadap isi pemberitaan di media massa pada era Reformasi.

## 2. Kegunaan dan Sumber Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis, yaitu memberikan sumbangan pengetahuan bagi materi pelajaran Sejarah Indonesia. Kemudian, secara praktis dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk menambah pemahaman dan wawasan, khususnya mengenai sejarah pers Indonesia.

### D. Metode dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah – kaidah penelitian sejarah atau historis.<sup>14</sup> Tahap *pertama*, Pemilihan Topik dengan tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengawasan pers oleh *media watch* di era Reformasi.

Tahap *kedua*, pengumpulan data atau heuristik melalui studi kepustakaan dan studi kearsipan untuk memperoleh buku-buku, artikel, majalah, surat kabar dan arsip yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan baik primer maupun sekunder. Studi kepustakaan dan kearsipan itu dilaksanakan pada: Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah DKI Jakarta, Dewan Pers, dan Arsip Nasional. Selain itu, peneliti menemukan data penting lainnya di lembaga pemantau media sekitar Jakarta antara lain Remotivi, dan Media Watch The Habibie Center,

Tahap *ketiga*, analisa data melalui acuan metode sejarah dengan melakukan seleksi terhadap data yang ditemukan. Ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan valid. Untuk itu dilaksanakan melalui dua cara

---

<sup>14</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2013), h. 69

yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern pada sumber, dilakukan agar dapat diperoleh keaslian sumber secara fisik. Sedangkan kritik intern pada sumber, agar sumber yang digunakan dalam penelitian ini mengandung unsur kredibilitas dan dapat dipertanggung jawabkan validitas datanya.

Tahap *keempat*, sumber-sumber yang sudah dikritik baik intern maupun ekstern diinterpretasikan atau ditafsirkan. *Terakhir*, penyajian dalam bentuk tulisan. Fakta-fakta yang diperoleh, kemudian disusun dan diseleksi dengan menggunakan penyajian deskriptif naratif yang banyak menguraikan kejadian tersebut dalam dimensi ruang dan waktu serta mengacu pada aspek tematis, sehingga bentuk tulisan penelitian ini menjadi jelas, sistematis, dan logis.

Bahan sumber primer yang dipergunakan untuk penelitian ini berupa sumber arsip, dokumen yang diterbitkan, koran, majalah, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber arsip didapatkan antara lain dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional, dan Arsip dari Dewan Pers.

Sumber Buku seperti, *Perspektif Pers Indonesia*, *Perbandingan Sistem Pers*, *Empat Teori Pers*, , *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*, *Mengelola Kebebasan Pers*, *Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik*, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, dan lain-lain. Beberapa jurnal yang membahas mengenai Pers Orde Baru dan Pers Reformasi juga dipakai dalam penelitian ini sebagai tambahan sumber buku yang didapat oleh peneliti dalam membahas *media watch* era Reformasi.



## **BAB II .**

### **PERS DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU**

#### **A. Transisi Pers Orde lama ke Pers Orde Baru**

Pemerintahan Orde Baru (selanjutnya disingkat Orba) mulai berkuasa di Indonesia setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 (selanjutnya disingkat Gestapu). Gestapu merupakan sebuah momentum keruntuhan kekuasaan Soekarno di Indonesia. Pidato pertanggungjawaban Soekarno atas kejadian Gestapu ditolak oleh MPRS pada Sidang Umum ke-IV tanggal 20 Februari 1967 dan beberapa bulan selanjutnya Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden sampai diadakan kembali Pemilu pada tahun 1971.

Praktek korupsi yang dilakukan banyak pejabat pada akhir masa pemerintahan Soekarno menimbulkan krisis moneter. Usaha pertama yang dilakukan Soeharto adalah menanggulangi krisis moneter yaitu dengan melakukan kerja sama dengan negara lain seperti Amerika Serikat (selanjutnya disingkat AS).<sup>15</sup> Selanjutnya, mengesahkan kebijakan penanaman modal asing yang membuka industri-industri baru di Indonesia.

Pemerintah Orde Baru (selanjutnya disingkat Orba) yang dipimpin oleh Soeharto mengembalikan Pancasila sebagai dasar filosofis sistem pemerintahannya. Nilai-nilai Pancasila oleh pemerintah Orba digunakan dalam pembenahan sistem sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Soeharto menyatakan sistem pemerintahan yang baru yaitu *Demokrasi Pancasila* pada Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 yang disampaikannya. *Demokrasi*

---

<sup>15</sup> Ahli-ahli ekonomi Amerika Serikat ditunjuk oleh Orde Baru untuk mengatasi krisis moneter yang menceleakakan negara pada masa akhir Soekarno. Richard Robison, *Sejarah Politik Orde Baru*, (Jakarta; LSP, 1984), h. 7

*Pancasila* mencerminkan sifat-sifat seperti kekeluargaan dan Gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

Selama berkuasa di Indonesia, Soeharto secara bertahap melakukan pembenahan sistem ketatanegaraan dan format-format politik untuk menjaga stabilitas nasional.<sup>17</sup> Format-format politik yang dirancang antara lain *Dwifungsi* Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),<sup>18</sup> membentuk Golongan Karya (Golkar), *magnifikasi* kekuasaan di tangan eksekutif, kebijakan depolitisasi dengan konsep *Floating Mass* (massa mengambang) terhadap masyarakat pedesaan, dan kontrol arbitrer pada pers yang menimbulkan pernyataan bahwa pers pada masa kepemimpinan Soeharto merupakan corongnya pemerintah.

Pada masa pemerintahan Soekarno corak pers partisan sangat dominan kehadirannya, yaitu pers yang berafiliasi dan menjadi alat propaganda partai-partai politik. Contohnya, Partai Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat NU) berafiliasi dengan *Duta Masyarakat*, Partai Katholik dengan *Kompas*, PKI dengan *Harian Rakjat*, dan lain-lain.<sup>19</sup> Pers dijadikan sebagai alat komunikasi politik dalam berbagai kesempatan, seperti pada waktu kampanye menjelang pemilu 1955, menyampaikan perspektif partai atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak semua pers di Indonesia pada masa Soekarno

---

<sup>16</sup> Frans Bona Sihombing, *Demokrasi Pancasila Dalam Nilai-Nilai Politik*, (Jakarta; Erlangga, 1984), h. 9

<sup>17</sup> Satrio Saptohadi, *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*, (Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11No 1 Januari 2011) h. 122

<sup>18</sup> Konsep *Dwifungsi* ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) pada 12 November 1958 di Magelang. *Dwifungsi* ABRI adalah suatu konsep politik yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik dalam supra maupun infra struktur politik sekaligus. Soebijono, dkk, *Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta; UGM Press, 1995), h. 1

<sup>19</sup> Abdul Manan, Semangat Sirnagalih : 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen, (Jakarta; AJI, 2014), h. 29-30

merupakan pers partisan. Sebagai contoh, Harian *Indonesia Raya* yang dipimpin oleh Mochtar Lubis merupakan pers yang bebas dalam artian tidak ada keberpihakan kepada salah satu partai politik atau golongan.

Corak Pers Partisan yang sangat dominan pada masa kepemimpinan Soekarno menghilang pada masa kepemimpinan Soeharto yang menghapus kebijakan multipartai di panggung politik Indonesia. Pers di Indonesia pada masa Soeharto dibagi menjadi dua periode yang perlu diperhatikan. Pembagian periode pers masa Orba adalah dampak dari terjadinya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), yaitu aksi demonstrasi mahasiswa terhadap dominasi modal Jepang di bidang ekonomi Indonesia dan menolak kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Dua periode Pers tersebut adalah Pra-Malari (1966-1973) dan Pasca-Malari (1974-1998).<sup>20</sup>

Pers di Indonesia Pra-Malari, diberikan ruang kebebasan oleh pemerintah Orba yang sebelumnya oleh Soekarno diawasi dengan ketat seperti adanya istilah “budaya telepon”<sup>21</sup>. Akan tetapi, kebebasan pers yang diberikan pemerintah Orba tidak untuk semua perusahaan pers, melainkan hanya untuk sebagian perusahaan pers yang mendukung Soeharto. Pers dijadikan alat pemerintah menghapus pengaruh *Komunisme* di Indonesia.<sup>22</sup> Pembubaran dan pelarangan surat-surat

---

<sup>20</sup> Sukri Abdurrachman, *Pers di Masa Orde Baru* dalam Muhamad Hisyam (ed), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 391

<sup>21</sup> Budaya telepon adalah praktek yang dilakukan pemerintah Orla untuk mengontrol pers di Indonesia. Praktek ini sering dilakukan Soekarno terhadap pers. Seperti dijelaskan dalam wawancara Mochtar Lubis dalam acara Perspektif di SCTV yang dipandu oleh Wimar Witoelar, bahwa beliau sering mendapatkan telepon yang mengancam akan dibawa ke meja persidangan karena tulisan-tulisannya yang kritis di Harian Indonesia Raya dan surat kabar lainnya yang memuat tulisannya. Ramadhan K.H, *Mochtar Lubis Bicara Lurus: Menjawab Pertanyaan Wartawan*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 267-268

<sup>22</sup> Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, (Jakarta; CV. MASAGUNG, 1988), h.161-171

kabar yang berafiliasi dengan PKI dilakukan, Surat kabar yang dibredel secara permanen antara lain *Harian Rakjat*, *Bintang Timur*, *Huo Chi Pao*, *Chung Cheng Pao*, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Ruang kebebasan yang diberikan kepada pers tidak berlangsung lama. Pasca Malari, Pendekatan pemerintah Orba terhadap pers mengalami perubahan yaitu pers kembali diawasi dengan ketat. Pemerintah Orba dalam usaha mengendalikan kehidupan pers yaitu dengan mengundangkan Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) dan beberapa peraturan tentang pers. Peraturan seperti keharusan memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pers (SIUPP) sangat berperan mengendalikan dan mengekang kehidupan pers di Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto.

## **B. Sistem Pers Orde Baru**

Pengertian tentang sistem banyak pendapat para ahli yang dapat kita pakai. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, sistem adalah sekelompok bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.<sup>24</sup> sistem dapat pula diartikan sebagai himpunan dari hubungan fungsional berbagai komponen yang mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output) melalui suatu proses menurut aturan dan saluran yang telah ditentukan.<sup>25</sup> Kesimpulannya, sistem adalah hubungan-hubungan beberapa alat dan komponen yang prosesnya telah ditentukan dengan suatu aturan dan memiliki tujuan.

---

<sup>23</sup> Abdul Manan. Op.cit. h. 31

<sup>24</sup> Satrio Saptohadi. Op.cit. h. 125

<sup>25</sup> F. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, (Jakarta; Gramedia, 1990), h. 8

Secara etimologis, kata *pers* (Belanda), *press* (Inggris), *presse* (Perancis) berarti “tekan” atau “cetak”.<sup>26</sup> Sejarah mencatat pers lahir bersamaan dengan mulai digunakannya alat-alat mekanik (mesin cetak), yang mampu melipatgandakan pesan-pesan komunikasi.<sup>27</sup> Isi pasal 1 dari Undang-undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.

Menurut Eric Hodgins, pers adalah pengiriman informasi dari *sini* ke *sana* dengan benar, seksama, dan cepat dalam rangka membela kebenaran, serta keadilan berpikir yang selalu dapat dibuktikan.<sup>28</sup> Pendapat yang sama juga dituliskan oleh Franz Magnis-Suseno dalam bukunya *Kuasa dan Moral*, bahwa pers sebagai sumber informasi dan pasar ide dari aspirasi/opini masyarakat.<sup>29</sup> Pers dalam melaksanakan profesinya berpegang pada etos kebenaran,<sup>30</sup> artinya masing-masing perusahaan pers boleh memberikan perspektif yang berbeda dengan yang lainnya pada suatu topik berita dengan catatan harus menyajikannya sesuai dengan fakta yang ada.

---

<sup>26</sup> Istilah pers sering digambarkan sebagai surat kabar dan majalah. Seiring perkembangan di dunia istilah pers meluas bukan hanya sebagai surat kabar dan majalah, namun juga untuk media lainnya seperti Radio, televisi, dan Internet. Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta; Grasindo, 2000), h. 2

<sup>27</sup> Ibid, h. 1

<sup>28</sup> Kustadi Suhandang(ed.), *An introduction to Journalism*, (Bandung; Karya Nusantara, 1978), h. 1

<sup>29</sup> Franz Magnis-Suseno, *Kuasa Dan Moral*, cetakan kelima, (Jakarta; Gramedia, 2001), h. 127

<sup>30</sup> Ibid. h. 128

Sistem pers dari uraian tentang sistem dan pers di atas dapat diambil sebuah kesimpulan, pers (terdiri dari pemilik media, dewan redaksi, dan wartawan) dalam melakukan proses penyebaran informasi sesuai aturan yang sudah disepakati bersama untuk suatu tujuan yang ingin dicapai. Sejarah mencatat, Indonesia tidak memiliki budaya komunikasi model pers yang mantap seperti di barat, menyebabkan perkembangan pers di Indonesia mengalami hambatan-hambatan yang sifatnya vertikal (model komunikasi Top-Down).

Sistem pers di Indonesia merupakan turunan dari sistem pemerintahan yang sedang digunakan. Pemerintah Orba menetapkan sistem pemerintahannya ialah *Demokrasi Pancasila*, dengan begitu pers Indonesia merupakan *Pers Demokrasi Pancasila* (tetapi sering disebut *Pers Pancasila*). Secara teoritis *Pers Pancasila* merupakan sistem pers Tanggung Jawab Sosial,<sup>31</sup> yang menerapkan bahwa tanggung jawab, fungsi dan kewajiban pers diatur dalam Garis besar haluan negara (GBHN).<sup>32</sup> Pers diharuskan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menjadi alat perjuangan mewujudkan cita-cita nasional. Pemerintah Orba menekankan dalam setiap pemberitaan yang akan dipublikasikan tidak mengganggu dan stabilitas nasional.

Pers Pancasila berbeda dengan pers masa *Demokrasi Parlementer* yang menitikberatkan pada kebebasan, dan pers masa *Demokrasi Terpimpin*

---

<sup>31</sup> Pemikiran dasar teori ini bahwa kebebasan, mengandung di dalamnya suatu tanggungjawab yang sepadan; dan pers, yang telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat, harus bertanggungjawab. kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Schram, Wilbur dan Peterson, *Empat Teori Pers*, (Jakarta; Intermasa, 1986), h. 83

<sup>32</sup> Dalam Ketetapan MPRS No. XXXII/1966 pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam arti liberalisme.

tekanan diberikan kepada tanggung jawab, sedangkan Sistem pers Pancasila kebebasan dan tanggung jawab diletakan secara seimbang.<sup>33</sup>

Selama berlakunya Pers Pancasila, pada saat-saat tertentu pers di Indonesia menikmati kebebasannya, tetapi ketika suhu politik sedang naik pengawasan terhadap pers kembali mengekang. Hal tersebut memunculkan setidaknya 2 praktek yang dilakukan khalayak pers yang berpengaruh terhadap penulisan berita selama pemerintahan Orba.

*Pertama*, warna *Eufimisme* pada pemberitaan-pemberitaan di media massa.<sup>34</sup> Eufimisme adalah penghalusan bahasa, yang pada prakteknya mengakibatkan *distorsi* informasi. Seharusnya berita merupakan rekonstruksi tertulis dari sebuah fakta, sebagaimana sebuah rekontruksi, fakta harus disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (etos kebenaran) sehingga pembaca dapat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. *Kedua*, *swasensor* yang memperburuk kredibilitas wartawan Indonesia. *Swasensor* atau sensor yang dilakukan oleh pers itu sendiri atas pemberitaannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Setidaknya dua hal tersebut harus dilakukan demi kelangsungan perusahaan pers agar tidak dibatalkan surat izinnya oleh pemerintah.

---

<sup>33</sup> Sukri Abdurrachman, *Pers di Masa Orde Baru* dalam Muhamad Hisyam (ed), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 389

<sup>34</sup> untuk menghindari tekanan-tekanan pemerintah dan agar tetap bisa hidup, pers menggunakan bahasa eufimisme atau penghalusan dalam pemberitaannya. konsekuensi penggunaan bahasa eufimisme adalah kaburnya fakta yang disampaikan, pada akhirnya membohongi khalayak umum. M. Syahri, *Intervensi Pemerintah Terhadap Kebebasan Pers dan Munculnya Eufimisme*, dalam *Prosiding Seminar Akademik Vol 2*, 2002. h. 119

### C. Undang-Undang Pers Pada Masa Orde Baru

Ketetapan (TAP) MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang pembinaan pers, merupakan langkah pertama pemerintah Orde Baru merumuskan undang-undang (UU) dan peraturan-peraturan tentang pers.<sup>35</sup> Perumusan UU Pokok Pers selain untuk mengatasi krisis di masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru, merupakan pelaksanaan pasal 28 UUD 1945 dalam TAP MPRS tersebut. Pemerintah Orba berkerja sama dengan DPR ditugaskan untuk segera merumuskan UU Pokok Pers yang baru oleh MPRS.

Pada tanggal 12 desember 1966 pemerintah bersama dengan DPR memenuhi Tap MPRS No. XXXII/MPRS/1966 dengan mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.<sup>36</sup> Undang-undang tersebut memiliki 21 pasal, yang terdiri dari 10 bab, yang mengatur dan membina pers Indonesia sebagai alat perjuangan.

Pemerintah Orde Baru menciptakan suatu kerja sama antara Departemen Penerangan (selanjutnya disingkat Deppen) dengan Dewan Pers dalam rangka pembinaan pers.<sup>37</sup> Anggota Dewan Pers diisi oleh perwakilan-perwakilan organisasi wartawan, organisasi penerbitan pers, dan para beberapa dari pemimpin redaksi media massa yang diketuanya adalah Menteri Penerangan. Kerja sama antara Deppen dan Dewan Pers dalam rangka pembinaan pers menghasilkan beberapa peraturan dan perundangan tentang pers.

---

<sup>35</sup> Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, (Jakarta; CV HAJI MASAGUNG, 1988), h. 171

<sup>36</sup> Ibid. h. 173

<sup>37</sup> Undang-undang No. 11 Tahun 1966 pada Bab 3 tentang Dewan Pers



Peraturan-peraturan tentang pers yang dibuat pemerintah Orba selama periode 1966-1969 antara lain seperti wartawan hanya diperbolehkan dan wajib terdaftar sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan perusahaan pers juga diharuskan terdaftar di organisasi perusahaan pers, yaitu Serikat Penerbitan Pers (SPS). Lisensi-lisensi yang dibutuhkan perusahaan pers juga merupakan kewenangan Deppen dan Dewan Pers. Peraturan-peraturan tersebut menjadikan pers terkooptasi dengan kepentingan pemerintah agar tidak mengganggu kebijakan-kebijakan yang sedang dilakukan, setidaknya hingga Indonesia keluar dari krisis moneter.<sup>38</sup>

Undang-undang No. 40/1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers pada tahun 1967 mengalami perubahan dengan pengesahan UU No. 4 tahun 1967, yaitu pada pasal 21 UU Pokok Pers ditambahkan 1 ayat yang menjelaskan dengan berlakunya UU tersebut maka ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 40 Tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum tidak berlaku lagi.<sup>39</sup>

Pembaharuan peraturan-peraturan tentang pers terus dilakukan untuk menyelaraskan dengan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah bersama dengan DPR mengundang UU No. 21 Tahun 1982 perubahan dari UU No. 11 tahun 1966 sebagaimana telah diubah/ditambah UU No. 4 Tahun 1967.<sup>40</sup> Surat Izin Terbit

---

<sup>38</sup> Muhammad Hisyam. Op.cit. h. 392

<sup>39</sup> Lihat isi pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1967 tentang penambahan Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers.

<sup>40</sup> J.C.T. Simorangkir "Perundang-undangan Pers Nasional Dan Pelaksanaannya, dalam Oka Kusumayudha, *Pemasyarakatan Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila*, (Jakarta; Departemen Penerangan RI, 1987), h. 115

(selanjutnya disingkat SIT) dihapus dan diganti dengan keharusan media massa dan percetakannya berbadan hukum serta wajib memiliki SIUPP.

Setelah hampir 2 tahun, Peraturan Menteri No. 1 tahun 1984 disahkan, yang isinya memberikan kewenangan Menteri Penerangan (pada saat itu hingga tahun 1997 dijabat oleh Harmoko) mencabut SIUPP milik suatu perusahaan pers setelah berkonsultasi dengan Dewan Pers, disusul Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 214A/ Kep/Menpen/1984 tentang Prosedur dan Persyaratan untuk Mendapatkan SIUPP pada 30 November 1984.<sup>41</sup> Mochtar Lubis berpendapat “kenyataan menunjukkan adanya perbedaan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran itu, yang seringkali diancam dengan pencabutan SIUPP. padahal, bebas dan bertanggung jawab tersebut bukan begitu maksud dan tujuannya”.<sup>42</sup>

Pada era SIUPP, tercatat beberapa waktu SIUPP oleh Menteri Penerangan dicabut dengan alasan pemberitaan yang diterbitkan mengganggu stabilitas nasional. Pencabutan SIUPP yang dilakukan pemerintah Orba dapat diklasifikasikan dengan 2 sifat pencabutannya, sementara dan tetap. Bersifat sementara yaitu dengan syarat membuat surat permintaan maaf kepada pemerintah dan memberikan pernyataan dalam surat kabarnya. Pencabutan SIUPP yang sifatnya tetap maksudnya tidak dibolehkan terbit lagi oleh pemerintahan Orba.

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, Dkk, *Semangat Sinargalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*, (Jakarta; AJI, 2014), h. 35

<sup>42</sup> Ramadhan K.H, *Mochtar Lubis Bicara Lurus: Menjawab Pertanyaan Wartawan*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 102

#### **D. Pembredelan pers pada masa Orde baru.**

Pada awal masa kepemimpinan Soeharto, kebebasan pers dapat dirasakan oleh masyarakat pers. Masa peralihan dari pemerintahan Orla ke pemerintahan Orba, Pers dijadikan sebagai alat konsolidasi menghilangkan sisa-sisa pengaruh *Komunisme* serta untuk melancarkan konsesus politik yang dilakukan oleh Soeharto sekitar tahun 1966-1969. Perusahaan-perusahaan pers yang berhaluan politik Komunisme menjadi yang pertama dalam sejarah pembredelan pers pada masa pemerintahan Orba.

Kebebasan pers yang diberikan pemerintahan Orba kepada pers tidak berlangsung lama. Setelah peristiwa Malari, pemerintah melakukan beberapa pembredelan terhadap beberapa pers secara serentak. Total yang dibredel secara serentak tersebut berjumlah 12 perusahaan pers, terdiri dari surat kabar harian, mingguan, dan satu majalah mingguan di beberapa kota.<sup>43</sup> Pemerintah Orba memberikan penjelasan bahwa pers yang dicabut izinnya adalah media massa yang dalam pemberitaannya secara langsung atau tidak langsung mendukung gerakan Malari.

Pembredelan terjadi kembali sekitar empat tahun Peristiwa Malari, pada tahun 1978. Pemerintah membredel kedua belas perusahaan pers tersebut karena pemberitaan-pemberitaan aksi demonstrasi mahasiswa di Bandung yang menolak Soeharto terpilih sebagai presiden dapat mengganggu stabilitas negara.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> 12 media cetak tersebut terdiri dari *Harian Abadi*, *Harian Indonesia Raya*, *Harian Kami*, *Harian Pedoman*, *Harian Nusantara*, *Harian The Jakarta Times*, *Mingguan Wenang*, *Mingguan Mahasiswa Indonesia* (Bandung), *Mingguan Pemuda Indonesia*, *Majalah Mingguan Ekspres*, *Harian Suluh Berita* (Surabaya), dan *Mingguan Indonesia*. Muhamad Hisyam (ed), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 391

<sup>44</sup> Abdul Manan. Op.cit. hlm. 34

Perusahaan pers yang dibreidel oleh Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) pada tahun itu adalah Harian *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Merdeka*, *Pelita*, *The Indonesia Times*, *Sinar Pagi* dan *Pos Sore*.<sup>45</sup> Pembreidelan ini bersifat sementara karena pemerintah Orba memberikan kesempatan kepada mereka untuk menulis surat permintaan maaf kepada pemerintah yang berjanji tidak akan melakukannya lagi ke depannya.<sup>46</sup>

Beberapa tahun berikutnya ketika UU No. 21 tahun 1982 (sebagaimana UU No. 11 tahun 1966 yang telah diubah/ditambah dengan UU No. 4 tahun 1967) dan Peraturan Menteri (Permen) No. 1 tahun 1984 diundangkan, tahun-tahun berlakunya SIUPP menambah catatan sejarah pembreidelan pers yang dilakukan rezim Orba. Perusahaan pers yang pertama kali SIUPP-nya dibatalkan oleh Menteri Penerangan, yaitu Harian *Sinar Harapan* pada oktober 1986.<sup>47</sup> Satu tahun berikutnya, Harian *Prioritas* ikut dibatalkan SIUPP-nya pada 29 Juni 1987.<sup>48</sup> Pencabutan SIUPP terus terjadi, pada tahun 1990 giliran Tabloid *Monitor* yang SIUPP-nya dibatalkan dan mengakhiri penerbitan tabloid yang tirasnya 600.000 eksemplar itu.<sup>49</sup> Nasib yang menimpa tiga perusahaan pers tersebut menjadi bukti bahwa peraturan SIUPP sangat mengekang pers bahkan sebelum menerbitkan beritanya, perusahaan pers dapat dibatalkan SIUPP-nya.

Pada tahun-tahun berikutnya ketika suhu politik tidak sedang naik pemerintah melonggarkan pengawasannya terhadap pers. Hal tersebut

---

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, (Jakarta; CV HAJI Mas Agung, 1988), h. 200-201

<sup>47</sup> Op.cit. h. 35

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid.

dilaksanakan sekitar awal dekade 1990-an karena kampanye era keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mempersiapkan negara dalam arus globalisasi di dunia. Kampanye keterbukaan tersebut ternyata tidak dilakukan dengan konsekuen oleh pemerintah Orba. Pembredelan terjadi kembali yaitu terhadap Majalah *Tempo*, *Editor*, dan Tabloid *Detik* pada 21 juni 1994. Pembredelan terhadap ketiga perusahaan pers tersebut merupakan pembredelan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto. Hal tersebut juga merupakan awal dari kehidupan pers yang kritis serta merupakan salah satu momentum ketidakpercayaan masyarakat dan keruntuhan pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto setelah lebih dari 30 tahun berkuasa.

### **BAB III .**

#### **PERUBAHAN WAJAH PERS DAN KEMUNCULAN *MEDIA WATCH* DI INDONESIA PADA AWAL ERA REFORMASI (1999-2004)**

##### **A. *Tempo* Menggugat dan Gerakan Reformasi Melengserkan Soeharto**

Pada tanggal 21 juni 1994, Harmoko (selaku Menteri Penerangan pada saat itu) setelah berkonsultasi dengan Dewan Pers memutuskan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (selanjutnya disingkat SIUPP) dari Majalah *Tempo*, *Editor*, dan Tabloid *Detik* dibatalkan. Pembatalan SIUPP terhadap ketiga media tersebut dikarenakan beberapa hal yang menurut pemerintah mengganggu stabilitas negara. Majalah *Tempo* dibatalkan SIUPP-nya karena pemberitaan mengenai “pembelian 39 kapal perang bekas Jerman” yang dilakukan Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie, dianggap memicu perpecahan dalam kabinet pemerintahan pada waktu itu,<sup>50</sup> Majalah *Editor* dibatalkan SIUPP-nya karena laporan berita yang kritis terhadap pemerintah dan memuat hasil wawancara dengan Dr. George Adicondro (seorang dosen dan Mantan Aktivis yang kritis dengan kebijakan Pemerintah mengenai Timor Timur),<sup>51</sup> dan yang terakhir Tabloid *Detik* dibatalkan SIUPP-nya karena pemberitaan mengenai demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dapat memprovokasi terjadinya kekacauan.<sup>52</sup>

Keputusan Harmoko membatalkan SIUPP milik *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* mendapat kecaman dari masyarakat. Munculnya reaksi yang begitu besar

---

<sup>50</sup> *Tempo* edisi akhir Mei 1994. Berjudul “*Jerman Punya Kapal, Indonesia Punya Beban*”, tulisan itu mengupas tentang pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur. Abdul Manan, Dkk, *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*, (Jakarta; AJI, 2014), h. 49

<sup>51</sup> Atmakusumah, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*, (Jakarta; Spasi & VHS Book, 2009), h. 57

<sup>52</sup> Satrio Saptohadi, *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*, (Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No 1, Januari 2011) h. 128

merupakan hasil dari tidak sejalan lagi pemikiran masyarakat Indonesia atas pembreidelan yang dilakukan pemerintah.<sup>53</sup> Masyarakat kecewa keputusan tersebut berlainan dengan kampanye pemerintah tentang era keterbukaan mempersiapkan Perencanaan Jangka Panjang Tahap II.

Sukri Abdurrachman berpendapat bahwa “tindakan tersebut merupakan sebuah kesalahan Soeharto yang tidak tanggap terhadap opini masyarakat yang merasa pemerintah tidak mampu mengatasi berbagai masalah pada tahun itu.”<sup>54</sup> Pemerintah Orba, yang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, banyak dikritik karena sangat mengutamakan pendekatan keamanan (*security aproach*) dalam melihat persoalan. Faktor lainnya adalah opini masyarakat yang sudah tidak ingin dipimpin oleh Soeharto, serta sudah terlalu tua dan terlalu lama menjadi presiden.<sup>55</sup>

Sepanjang dinamika sosial-politik dalam negeri, ditandai semakin cerdasnya masyarakat dan dimulainya Globalisasi. maka sejak awal tahun 1990-an kebebasan menjadi fokus yang dibicarakan dan terus diperjuangkan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan demokrasi dengan menitikberatkan pada fungsi pers/media massa sebagai kontrol terhadap kekuasaan yang semakin gencar dilakukan.<sup>56</sup>

Goenawan Mohammad bersama 43 wartawan dan karyawan eks-*Tempo* menggugat keputusan Menteri Penerangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

---

<sup>53</sup> Sukri Abdurrachman, *Pers di Masa Orde Baru* dalam Muhamad Hisyam (ed), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 417

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Bertahta semenjak 1965, tahun 1990-an itu Soeharto kian kedodoran. Kekuasaan maupun fisiknya. Soeharto, contohnya diberitakan terkena penyakit ginjal yang kronis. Pada sebuah acara kenegaraan di DPR, Soeharto pernah berpidato sembari duduk. Meski dalam beberapa kesempatan Moerdiono menegaskan bahwa batu ginjal itu sudah luruh, spekulasi tentang sakitnya Soeharto itu memantik pergesekan di lingkaran dekatnya. Abdul Manan, Dkk, *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*, (Jakarta; AJI, 2014), h. 51

<sup>56</sup> Joko Martono, *Kebebasan Pers di Indonesia Pada Era Reformasi dan Ekonomi Politik Media*, (INSANI, Vol. 1 No. 1 Desember 2014), h. 12

(PTUN) Jakarta pada tanggal 7 september 1994.<sup>57</sup> Pertama kalinya dalam sejarah pers Orde Baru, perusahaan pers yang dibatalkan SIUPP-nya menggugat kembali keputusan tersebut ke pengadilan. Gugatan yang dilayangkan Goenawan Mohammad tersebut antara lain dikarenakan desakan wartawan-wartawan lain (nasional dan internasional), reaksi masyarakat (terjadi demonstrasi penolakan keputusan Menteri Penerangan tersebut), serta alasan pembatalan SIUPP yang tidak masuk akal.<sup>58</sup>

Pada tanggal 3 Mei 1995 setelah hampir satu tahun persidangan, di luar dugaan Hakim Ketua PTUN menyatakan Surat Keputusan (SK) 123/Menteri Penerangan/1994 kepada Majalah *Tempo* tidak tepat/inkonstitusional.<sup>59</sup> Keputusan itu dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan gugatan tersebut kembali menang pada tanggal 21 November 1995.<sup>60</sup> Akan tetapi kemenangan Goenawan Mohammad atas gugatannya terhadap keputusan Menteri Penerangan yang membatalkan SIUPP milik *Tempo* tidak berlangsung lama. Pada tanggal 13 Juni 1996, Keputusan Menteri Penerangan membatalkan SIUPP Majalah *Tempo* dianggap benar oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membenarkan keputusan tersebut karena pembatalan SIUPP berbeda dengan arti pembreidelan.<sup>61</sup>

Pembreidelan terhadap *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* melahirkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang dideklarasikan di daerah Sirnagalih, Bogor pada

---

<sup>57</sup> Bambang Bujono, DKK, *Mengapa Kami Menggugat*, (Jakarta; Yayasan Alumni TEMPO, 1995), h. 94

<sup>58</sup> Ibid. h. 25-30

<sup>59</sup> Ibid. h. 158-159

<sup>60</sup> Atmakusumah, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*, (Jakarta; Spasi & VHS Book, 2009), h. 69

<sup>61</sup> Ibid. h. 73-75



bulan agustus 1994. AJI merupakan Sebuah organisasi wartawan yang dibentuk atas kekecewaan terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (selanjutnya disingkat PWI) memaklumi keputusan Menteri Penerangan atas pembreidelan *Tempo*, *Editor*, *Detik*. Dalam perlawanannya terhadap pemerintah, AJI menerbitkan sebuah media alternatif yaitu *Independen* yang berubah menjadi *Suara Independen* (karena *Independen* dilarang pemerintah). *Independen* dan *Suara Independen* adalah Majalah yang diedarkan secara terbatas oleh AJI karena adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Perkembangannya setelah pembreidelan terhadap *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* juga berdampak pada cara-cara penyebaran informasi dan laporan-laporan yang kritis terhadap pemerintahan Orba. Goenawan Mohamad bersama rekan-rekannya membuat sebuah jaringan bawah tanah, yang dikenal dengan “Jaringan Blok M”.<sup>62</sup> Dengan memanfaatkan teknologi serta bantuan dana dari luar negeri, Jaringan Blok M menjadi alat bagi jurnalis dan aktivis dalam menyampaikan opini dan kritik yang tidak bisa dijangkau pemerintah.

Pembreidelan terhadap Majalah *Tempo*, *Editor*, dan Tabloid *Detik* merupakan yang terakhir pada masa pemerintah Soeharto. Aksi-aksi demonstrasi yang berkepanjangan selama lebih dari satu tahun, dan berdirinya AJI sebagai alternatif organisasi pers selain PWI menandakan bahwa tekanan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi semakin tidak populer di masyarakat pada kurun waktu pertengahan 1990-an.

---

<sup>62</sup> Blok M bekerja sama dengan Nusanet, sebuah sistem internet dari kalangan NGO, serta Apakabar, mailing list di Maryland dengan moderator John MacDougall. Naskah dikirim kepada MacDougall. Dia lantas sebar naskah itu lewat [apakabar@clark.net](mailto:apakabar@clark.net). Andreas Harsono, *Blok M*, <http://www.andreasharsono.net/2011/07/blok-m.html> (11 oktober 2017)

Krisis moneter pada tahun 1997 yang terjadi di Thailand berdampak luas hingga ke Indonesia. Nilai Rupiah dalam waktu yang singkat menurun terhadap Dollar Amerika Serikat (selanjutnya disingkat AS). Dampaknya yang sangat terasa adalah hutang Indonesia membengkak akibat nilai tukar Rupiah yang rendah terhadap Dollar AS tersebut.

Dampak krisis moneter menjadi besar dan meluas karena diperberat berbagai musibah nasional seperti kegagalan panen di banyak tempat karena musim kemarau yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan.<sup>63</sup> Akibat dari ketidakmampuan pemerintah secara cepat mengatasi krisis moneter tersebut, terjadilah Gerakan Reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa sepanjang tahun 1997 hingga lengsernya Soeharto di pertengahan tahun 1998.

Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang awalnya terjadi di Jakarta, menjadi luas ke beberapa daerah di pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Pada awalnya gerakan tersebut menuntut pemerintah agar segera melakukan tindakan atas krisis moneter yang terjadi, akan tetapi Gerakan Reformasi berubah menjadi sebuah gerakan politik, dikarenakan Soeharto terpilih kembali untuk memegang jabatan sebagai presiden untuk periode 1998-2003.<sup>64</sup>

Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi penyerbuan dan penembakan oleh aparat keamanan ke dalam kampus Universitas Trisakti yang menewaskan 4 orang

---

<sup>63</sup> Lepi T. Tarmidi, *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF, dan Saran*, (revisi dan updating dari pidato pengukuhan Guru Besar Madya pada FEUI dengan judul “*Krisis Moneter Tahun 1997/1998 dan Peran IMF*”, Jakarta, 10 Juni 1998), h. 1

<sup>64</sup> Gerakan Reformasi di Indonesia ini dilahirkan oleh meluasnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas, Krisis ekonomi dan ketidakpuasan atas situasi politik melahirkan gerakan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di tahun 1998. Denny. J.A, *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta; LKIS, 2006), h. 23

mahasiswa.<sup>65</sup> Peristiwa yang dikenal dengan Tragedi Trisakti ini menambah catatan merah pemerintah Soeharto menjelang lengsernya. Tuntutan Soeharto untuk turun dari jabatannya (1997-1998) tidak bisa lagi dipertahankan. Puncaknya ketika mahasiswa “menduduki” gedung DPR/MPR di kompleks senayan dan penolakan beberapa menteri yang diminta menjabat kembali pada kabinet Reformasi, akhirnya Soeharto memutuskan untuk turun dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri (dikenal dengan istilah *Lengser Keprabon*) dan Wakil presiden (Wapres) B.J. Habibie sesuai dengan konstitusi menggantikan Soeharto sebagai Presiden.

#### **B. Revisi Undang-undang Pers Pada Awal Era Reformasi (1999-2002)**

Lengsernya Soeharto setelah lebih dari 30 tahun berkuasa merupakan awal dari “Era Reformasi”, lalu digantikan B.J. Habibie sebagai presiden. Masa kepemimpinan Habibie berada dalam masa transisi yang sangat labil, sistem lama yang otoriter sudah kehilangan legitimasinya. Sementara konsensus tentang sistem yang baru belum selesai dirumuskan, periode transisi yang labil ini penting untuk diperhatikan dengan bijak sebagai upaya pencapaian kehidupan yang demokratis di era Reformasi.<sup>66</sup>

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, beragam masalah yang harus segera diselesaikan. Selain daripada itu harus melaksanakan tuntutan-tuntutan dari

---

<sup>65</sup> Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie. Sementara korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tim Peneliti, *Kasus Trisakti, Semanggi I dan II : Penantian Dalam Ketidakpastian*, Kertas Posisi KONTRAS (Jakarta, Desember 2005), h. 1

<sup>66</sup> Denny. J.A, *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta; LKIS, 2006), h. 39

Gerakan Reformasi, yaitu menciptakan kehidupan yang demokratis.<sup>67</sup> Pemahaman B.J. Habibie tentang demokrasi, dengan pemikiran proses demokratisasi erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia.<sup>68</sup> Presiden B.J. Habibie merancang kembali susunan kabinet Reformasi dengan pola yang berbeda dari pemerintah sebelumnya.<sup>69</sup> Beberapa posisi dalam kabinet diubah menjadi lebih demokratis sesuai azas profesionalitas.<sup>70</sup> Hal itu dirasa oleh Habibie harus dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari masa krisis.

Reformasi yang sedang dilaksanakan pemerintah Habibie tidak lantas lancar, kekacauan seperti bentrokan antara aparat keamanan dan mahasiswa masih tetap terjadi meskipun Soeharto sudah lengser. Pada saat akan diselenggarakannya Sidang Istimewa (Selanjutnya disingkat SI) MPR pada bulan November 1998. Mahasiswa kembali menuntut isi dari SI MPR yang masih melestarikan warisan Orba, yaitu Golongan Karya (Golkar) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) posisinya tetap kuat dalam UU tentang DPR/MPR yang akan diratifikasi dalam SI MPR.<sup>71</sup> Akibatnya, kerusuhan seperti Tragedi Trisakti

---

<sup>67</sup> Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan Emil Salim bersedia menerima kepemimpinan B.J.Habibie hanya sebagai “Pemerintah Transisi”. Tugasnya ialah menanggulangi krisis dan menata ulang sistem tata negara ke arah yang demokratis. Ahmad Watik Pratiknya, DKK, *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J.Habibie*, buku satu : *Ekonomi dan Politik*,(Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 189

<sup>68</sup> Ibid. h. 205

<sup>69</sup> Melakukan pertimbangan sendiri yang dilakukan oleh Habibie pada malam sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden, dan telah membuat beberapa poin untuk nantinya akan langsung segera dijalankan oleh dirinya sendiri, para Menteri atau bawahannya. B.J. Habibie, *Detik-detik yang Menentukan*,(Jakarta; THC Mandiri, 2006), h. 56-58

<sup>70</sup> Ibid, h. 73-88

<sup>71</sup> Mereka menuntut Habibie menyerahkan kuasa kepada pemerintah transisi yang dipimpin oleh presidium kepemimpinan proreformasi yang terdiri atas Megawati Soekarno Putri (PDI-P), Abdurrahman Wahid (pimpinan NU, kekuatan utama Partai Kebangkitan Bangsa-PKB), Amien Rais (pimpinan PAN), pemegang hadiah Nobel, Uskup Carlos Belo dari Timor-timur dan sultan Hamengkubuwono X, Chris Manning dan Peter Van Diermen, *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*,(Yogyakarta; LKIS, 2000), h. 21

terulang kembali sekitar tanggal 8-14 November 1998, yaitu Tragedi Semanggi I dan II.<sup>72</sup>

Pada tanggal 28 juni 1998, seminggu setelah pengunduran diri Soeharto, terjadi demonstrasi yang dilakukan wartawan-wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disingkat LSM) dengan beberapa tuntutan. Tuntutan-tuntutan tersebut antara lain yaitu meminta kepada pemerintah untuk membebaskan 4 wartawan (3 orang wartawan AJI, dan 1 orang aktivis Pusat Informasi dan Jaringan Aksi untuk Reformasi atau PIJAR)<sup>73</sup> yang dipenjara oleh pemerintah yang sebelumnya, serta secepatnya merevisi UU Pers dan peraturan-peraturan menteri yang mengekang kemerdekaan pers pada masa Soeharto.

Indikator sebuah negara yang demokratis adalah terdapatnya jaminan kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*) dan kemerdekaan pers (*freedom of the press*). Ini merupakan bagian dari adanya jaminan terhadap hak sipil dan hak politik. Bagi negara yang demokratis, jaminan ini sebuah keharusan. Tanpa jaminan terhadap *freedom expression*, *freedom of speech* dan *freedom of the press*, tidak akan pernah ada demokrasi.<sup>74</sup>

Muhammad Yunus Yosfiah selaku Menteri Penerangan pada saat itu menanggapi dengan baik tuntutan-tuntutan demonstran. Peraturan awal yang dikeluarkan Menteri Penerangan ialah melonggarkan pengurusan syarat-syarat

---

<sup>72</sup> 18 orang mahasiswa meninggal, 4 orang diantaranya adalah yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi dan BR Norma Irmawan. Sementara korban yang luka-luka mencapai 109 orang, baik masyarakat maupun mahasiswa, Tim Peneliti, *Kertas Posisi Kontras : Kasus Trisakti, Semanggi I dan II Penantian Dalam Ketidakpastian*, (Jakarta; KONTRAS, 2005), h. 1

<sup>73</sup> Atmakusumah, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*, (Jakarta; Spasi & VHS Book, 2009), h. xii-xiii

<sup>74</sup> Amir Effendi Siregar, Mengawal dan Menegakkan Demokratisasi Komunikasi dan Media, prolog dalam buku Bayu Wahyono, DKK, *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi: Studi Evaluatif terhadap peran Regulator Media dan Komunikasi dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta; PR2Media & Tifa Foundation, 2011), h. xiv

memperoleh SIUPP.<sup>75</sup> Menteri penerangan juga menghapus SK Deppen mengenai PWI dan Serikat Perusahaan Pers (selanjutnya disingkat SPS) sebagai organisasi tunggal untuk khalayak pers. Peraturan tersebut memberikan kebebasan kepada khalayak pers untuk mendirikan organisasi di luar PWI dan SPS.

Sejak akhir tahun 1998, perancangan UU Pers baru dilakukan Deppen bersama Dewan Pers yang selanjutnya diajukan kepada Komisi I DEWAN PERSR untuk disidangkan. Atmakusumah menjelaskan dalam pengantar bukunya yang berjudul “Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi”, Mohammad Yunus Yosfiah meminta dirinya menjadi narasumber pemerintah dalam rancangan undang-undang tersebut, dengan sangat terbuka beliau menerima saran-sarannya.

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan oleh Presiden Habibie pada tanggal 23 September 1999. Keharusan memiliki SIUPP yang selama ini mengekang kehidupan pers dihapus dalam UU Pers yang baru. Undang-undang pers tersebut juga merubah Dewan Pers menjadi lembaga independen di mana tidak ada lagi penempatan wakil-wakil pemerintah dalam struktur anggotanya.<sup>76</sup>

Leo Batubara dalam buku “Problematika Kemerdekaan Pers di Indonesia”, UU Pers yang baru tersebut berisi dua hal pokok. *Pertama*, UU No. 40/1999 melindungi kemerdekaan pers, pemerintah tidak berwenang mengintervensi pers seperti pada rezim Orba. *Kedua*, UU No. 40/1999 mengamankan pers

---

<sup>75</sup> selama 32 tahun Orde Baru memerintah jumlah perusahaan pers di Indonesia berjumlah 289, belum satu tahun usia reformasi jumlah media cetak baru sudah 582 tersebar di beberapa daerah. Jakob Oetama, *Pers Indonesia*, (Jakarta; Kompas, 2001), h. 43

<sup>76</sup> Lihat pasal 15 ayat 1. pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

melaksanakan lima fungsinya yaitu sebagai media yang informatif, edukasi, hiburan, lembaga ekonomi, dan kontrol sosial.<sup>77</sup>

Pergulatan hukum dan undang-undang tentang pers terus berlanjut hingga UU No. 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran diundangkan. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari UU No. 24 Tahun 1997 yang menjabarkan bahwa penyiaran di Indonesia dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah.<sup>78</sup> Pada masa berlakukannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran diwarnai dengan pro kontra terutama berkaitan dengan lembaga pengawas Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N).<sup>79</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia teknologi dan juga perkembangan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Oleh sebab itu, pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pengesahan UU No. 32/2002 tentang penyiaran oleh Megawati Soekarnoputri, dengan begitu badan atau lembaga independen yang mengurus penyelenggaraan penyiaran dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).<sup>80</sup>

### **C. Kemunculan *Media Watch* di Indonesia**

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers pada pasal 17, menjelaskan bahwa pengawasan pers bukan lagi kewenangan pemerintah,

---

<sup>77</sup> Samsuri, *Problematisasi Kemerdekaan Pers di Indonesia*, (Jakarta; Dewan Pers, 2009), h. 3-5

<sup>78</sup> Lihat Undang-undang No. 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran pada pasal 7

<sup>79</sup> Denico Doly, *Urgensi Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, (Jurnal Negara Hukum DPR Vol 4 No. 2, November 2013), h. 215-216

<sup>80</sup> Lihat pasal 7 pada Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

melainkan membuka lebar koridor pengawasan pers kepada masyarakat secara hukum, khususnya mengenai pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya disingkat KEJ) oleh wartawan. Penjabaran UU Pers pasal 17 juga menjelaskan adanya koridor pengawasan tersebut diharapkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Perkembangan UU Pers mengenai peran serta masyarakat (*media watch*) merupakan hal yang baru dalam sejarah pers di Indonesia. Penjelasan dalam UU Pers tersebut menegaskan agar penyelesaian masalah dengan pers dapat diselesaikan secara damai. Masyarakat yang merasa tersinggung dengan pemberitaan yang dilakukan pers dapat mengajukan Hak Jawab, dan bisa meminta bantuan dari Dewan Pers untuk proses mediasi. Pada Masa transisi Orde Baru ke Reformasi, masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui mengenai cara-cara mengawasi pers dan penyelesaian masalah dengan pers. Akibatnya, perseteruan masyarakat dengan pers sering terjadi tindakan kekerasan (seperti diselesaikan lewat unjuk rasa atau demonstrasi, beberapa kali juga terjadi tindakan penganiayaan terhadap wartawan dan pengerusakan terhadap salah satu kantor media massa).

Sepanjang tahun 1999 hingga tahun 2000 terjadi demonstrasi ke satu stasiun radio di Maluku tengah hingga kantornya dibakar massa, dan sejumlah demonstrasi lainnya ke beberapa kantor surat kabar seperti *Pos Kita* di Solo, *Irja*



*Pos* di Jayapura, serta wartawan *Kediri Pos* diciduk petugas intel polisi.<sup>81</sup> Tindakan-tindakan itu dapat terjadi karena berita yang dimuat media massa menyinggung suatu kelompok elit, adat, agama, dan lain-lain.

Perseteruan antara masyarakat dan pers di Indonesia dapat terjadi tidak menutup kemungkinan karena kemunduran kualitas pers di Indonesia, seperti pelanggaran kode etik, penggunaan kata-kata yang vulgar, dan lain-lain dilakukan oleh pers pada awal era Reformasi. Hal tersebut membuat para pengamat pers dan praktisi jurnalis yang sadar berinisiatif mendirikan lembaga pemantau media (selanjutnya disingkat LPM) atau *media watch*.

Bertolak dari perjalanan sejarah bangsa, kiranya kita sepakat, pers tidak boleh dibiarkan tiarap atau mati suri kembali. Kemerdekaan pers bukanlah persoalan pers semata-mata. Kemerdekaan pers adalah hak warga negara yang berdaulat, yaitu hak untuk bebas mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak untuk memperoleh informasi (*the public right to know*).<sup>82</sup>

*Media watch* merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disingkat LSM) pemerhati pers yang mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam isi pemberitaan di media massa, dan dapat membantu masyarakat tentang cara menilai mutu isi dan tampilan terbitan media cetak serta siaran radio dan televisi.<sup>83</sup> Kedudukan atau fungsi *media watch* adalah tempat data pusat pemikiran yang kritis dan objektif untuk kepentingan pengelola media massa maupun masyarakat sebagai konsumen media.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Panitia Hut PWI, *PWI 55 Tahun: Menegakkan Profesionalisme & Etika Pers di Era Multimedia*, (Jakarta; Metro Pos, 2001), h. 36

<sup>82</sup> Sabam Leo Batubara, *Indonesia Bergulat Dalam Paradoks*, (Jakarta; Dewan Pers, 2009), h. 113

<sup>83</sup> Atmakusumah, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*, (Jakarta; Spasi & VHS Book, 2009), h. 161

<sup>84</sup> Ibid.

Lembaga pemantau media atau *media watch* yang pertama kali muncul di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Pers (selanjutnya disingkat YLKP) pada bulan maret 1999 di Surabaya, tetapi karena terjadi perbedaan pandangan sebagian anggotanya keluar dan mendirikan Yayasan Lembaga Konsumen Media (selanjutnya disingkat YLKM) pada tahun 2000 masih di kota yang sama.<sup>85</sup> Kebutuhan hadirnya YLKM ialah untuk mengawasi pemberitaan di media massa mengenai berita-berita Pemilu tahun 1999.

Menurut Wisnu Prasetya Utomo, kehadiran *media watch* pada awalnya tidak populer di pandangan masyarakat umum dan khususnya khalayak pers.<sup>86</sup> Ketidakpopulerannya *media watch* dilatarbelakangi “semangat zaman” pada era Reformasi yang tidak menghendaki adanya pembatasan atau pengawasan terhadap pers. Setiap ide untuk memantau atau mengawasi pers di era Reformasi sering dituduh sebagai bentuk menghidupkan kembali semangat otoritarianisme ala Orde Baru. Padahal, Keberadaan *media watch* merupakan upaya menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

#### **D. Kebebasan Pers Yang Keablasan (1999-2004)**

Peran pers sebagai pilar keempat demokrasi hanya berjalan konsekuen sejak awal Gerakan Reformasi hingga lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Arah pers menjadi membingungkan memasuki era Reformasi. Pers dinilai lebih mengutamakan konsep berita yang sensasional, partisipan dan terkadang

<sup>85</sup> <https://indonesianmediawatch.worDewan Persress.com/profile/> (3 November 2017)

<sup>86</sup> Pemahaman terkait keberadaan LPM ini barangkali terasa tidak populer bagi para pemilik media maupun jurnalis. Padahal, jika mau melihat lebih jauh, kritik yang substantif terhadap media akan menjadi vitamin yang menambah mutu jurnalisme itu sendiri. Pada era awal reformasi misalnya, gagasan mengenai keberadaan LPM akan dianggap menjadi sebuah ide yang aneh. <http://www.remotivi.or.id/amatan/48/Mempertanyakan-Peran-Pemantau-Media> (3 November 2017)

menyinggung suatu kelompok agama, suku dan adat daripada berita yang informatif dan edukatif. Tidak sedikit pula yang melanggar nilai dan norma masyarakat serta tidak mengindahkan KEJ yang berlaku. Empat praktek menyimpang pers pada masa reformasi yang meresahkan masyarakat yaitu eksploitasi judul, sumber yang tidak jelas, dan berita yang tidak objektif.

Kebebasan pers yang kembali dirasakan oleh masyarakat pers menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positif, selain dari pers yang merdeka ialah pertumbuhan jumlah pers yang pesat,<sup>87</sup> sedangkan dampak negatif dari kebebasan pers di era Reformasi yaitu kemunduran kualitas pers seperti banyaknya pemberitaan di media massa yang dibumbui sensasional, tidak informatif, tidak mendidik dan sebagian besar wartawannya tidak profesional.<sup>88</sup>

Akibat kondisi dari pers Reformasi yang tidak stabil tersebut menimbulkan pernyataan “kebebasan pers saat ini kebablasan” dari kalangan elit dan masyarakat. Penjabaran dalam UU No. 40/1999 tentang pers menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan. Meski demikian masih kerap terdengar pendapat agar pemerintah punya kewenangan kembali dalam melakukan sensor, bahkan kewenangan untuk membreidel lagi.<sup>89</sup>

Pada 20 oktober 1999, pemilihan presiden dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur berhasil mengalahkan perolehan suara

---

<sup>87</sup>Sejak 5 juni 1998 sampai dengan 2 maret 1999 departemen penerangan mengeluarkan 731 Surat Izin Usaha Penerbitan Pers baru, dan 40 persen diantaranya dapat terbit. Atmakusumah, Op.cit. h. 13

<sup>88</sup> Panitia Hut PWI, PWI 55 Tahun: *Menegakkan Profesionalisme & Etika Pers di Era Multimedia*, (Jakarta; Metro Pos, 2001), h. 37

<sup>89</sup> Lukas Luwarso, DKK, *Mengelola Kebebasan Pers*, (Jakarta; Dewan Pers, 2008), h. 42-47

dari Megawati Soekarnoputri. Lalu, posisi wakil presiden ditempati oleh Megawati Soekarnoputri. Gus Dur bersama dengan Megawati Soekarnoputri membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet tersebut diisi oleh kekuatan koalisi partai politik (parpol) antara lain PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, Partai Keadilan dan beberapa dari non-partisan dan TNI.

Kabinet pertama di era Reformasi ini diharapkan dapat membangun tradisi pemerintahan yang bersih dan efektif untuk kedepannya, tetapi realitasnya kabinet tersebut dapat dikatakan buruk. Pemerintahan yang seharusnya berpihak terhadap aspirasi rakyat, sebagian besar kerja-kerja kabinet merupakan kepentingan partai.<sup>90</sup> Pandangan demokrasi dan kehidupan masyarakat yang pluralistik yang dimiliki oleh Gus Dur terhambat karena kerja sama kabinet yang buruk.

Kondisi kabinet yang buruk, tidak menyurutkan usaha demokratisasi yang dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur bersama Megawati Soekarnoputri bertekad melanjutkan kebebasan pers yang sudah ada dengan UU No. 40/1999 tentang pers.<sup>91</sup> Salah satu usaha penting yang dilakukan Gus Dur menjaga keran kebebasan pers di Indonesia yaitu dengan membubarkan Deppen. Alasan Gus Dur

---

<sup>90</sup> Pemilu 1999 pun menghasilkan orang-orang beraneka ragam di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dewan pusat sebagian besar kursi masih dikuasai muka-muka lama, baik yang berbaju Golkar dan PPP, maupun yang ganti baju PDIP, PKB, PAN, dan PBB. Tetapi kursi DPR banyak diduduki oleh muka-muka baru, yang sebagian besar tidak jelas integritasnya. Tidak heran jika Pemilu 1999 tidak hanya menghasilkan pemerintahan buruk, tapi juga korup. Abdul Manan, DKK, *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*, (Jakarta; AJI, 2014), h. 331

<sup>91</sup> Panitia Hut PWI, *PWI 55 Tahun: Menegakkan Profesionalisme & Etika Pers di Era Multimedia*, (Jakarta; Metro Pos, 2001), h. 37

membubarkan Deppen adalah untuk menghapus sisa-sisa pengaruh dari rezim Orba, yang merupakan senjata untuk mengekang pers.<sup>92</sup>

Keputusan Gus Dur membubarkan Deppen tidak sedikit pula yang menentang. Mereka yang menentang keputusan tersebut berpendapat pemerintah tidak memiliki badan atau lembaga negara untuk mengawasi pers yang dinilai masih diperlukan pada waktu itu.<sup>93</sup> Tindakan kontroversial yang dilakukan Gus Dur adalah hasil dari pemikirannya tentang kehidupan yang demokratis dan pemahamannya tentang liberal.<sup>94</sup>

Perhatian pers selama masa pemerintahan Gus Dur yang singkat (1999-2001), yaitu sikap, pernyataan, dan tingkah laku Gus Dur yang dinilai bertolak belakang dengan yang sebelumnya dilakukan ketika rezim Orba masih berkuasa. Kritik-kritik pedas dan tajam yang terkadang sarkas di media massa tentang Gus Dur sering dimuat. Penggambaran Gus Dur yang sering muncul di media massa adalah Gus Dur yang tidak konsekuen pada kepemimpinannya.<sup>95</sup> Gus Dur dinilai tidak melakukan tindakan yang cepat dan tegas, ketika kabinetnya yang kacau dan tidak efektif serta kondisi negara yang masih buruk setelah krisis moneter menimpa Indonesia.<sup>96</sup> Meskipun begitu, keputusan Gus Dur membubarkan Deppen merupakan langkah menjaga kebebasan pers di Indonesia.

---

<sup>92</sup> Winarta Adisubrata, *Dari Persbreidel Ordonantie Tahun 1931 Hingga Kemerdekaan Pers dalam Era Reformasi*, dalam kumpulan tulisan *Ancaman Perundang-undangan Terhadap Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers Edisi No. 8 Tahun 2013, (Jakarta; Dewan Pers, 2013), h. 15

<sup>93</sup> Atmakumah, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*, (Jakarta; Spasi & VHS Book, 2009), h. 113

<sup>94</sup> Arief Budiman menuliskan pernyataan Romo Mangunwidjaya tentang Gus Dur, "Ingat, yang dibenak Gus Dur cuma persatuan, dia harus dihormati". Arief Budiman, "*Beberapa Catatan Tentang Gus Dur*", dalam buku Irwan Suhandi, *Gus Dur Santri Par Excellence*, (Jakarta; Kompas, 2010), h. 138-146

<sup>95</sup> Ibid. h. 142

<sup>96</sup> Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta; LKIS, 2001), h. 238-242

Pada masa kepemimpinan Gus Dur yang terbilang singkat (1999-2001) hingga masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri (2001-2004), diwarnai tindakan kekerasan terhadap pers. Tindak kekerasan terhadap media antara lain dilakukan oleh oknum pemerintah pusat/daerah, dan masyarakat (Organisasi Masyarakat, kelompok agama, kelompok adat, dan lain-lain). kejadian-kejadian kekerasan terhadap pers dapat terjadi karena pejabat atau masyarakat yang merasa tersinggung atas suatu berita yang dimuat di media massa yang bersangkutan.

Sebenarnya, konflik antara pers, pemerintah, dan masyarakat terjadi karena tidak adanya kesepakatan bersama mengenai kebebasan pers. Pers beranggapan bahwa kegiatan profesi mereka dijalankan sesuai UU pers. Pemerintah pusat maupun daerah menilai kebebasan pers masih perlu diawasi karena bisa disalahgunakan oleh pihak pers. Berbeda dengan masyarakat, setelah bebas dari rezim Orba yang otoriter pers masih dianggap sebagai alat kekuasaan, serta belum memahami *Hak Jawab* dan *Hak Tolak*.<sup>97</sup>

Di kalangan elit dan kelompok masyarakat kerap muncul pernyataan bahwa pers di Indonesia saat ini sangat bebas, bahkan lebih bebas dibandingkan dengan pers di negara maju. Sejumlah elit bahkan kerap mengatakan kondisi media saat ini sudah “kebablasan” akibat terlalu liberal dan bebas. Di penghujung tahun 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri misalnya pernah mengeluhkan kondisi pers di Indonesia.<sup>98</sup>

Pendapat lain mengenai fenomena pers di Indonesia era Reformasi adalah industrialisasi pers. Pada masa Reformasi untuk mendirikan sebuah media massa tidak perlu memperoleh izin terbit lagi dari pemerintah, tetapi perusahaan pers

---

<sup>97</sup> Atmakusumah, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*, (Jakarta; Spasi & VHS Book, 2009), h. 143

<sup>98</sup> Lukas Luwarso, DKK, *Mengelola Kebebasan Pers*, (Jakarta; Dewan Pers, 2008), h. 22

wajib berbentuk badan hukum.<sup>99</sup> Hal tersebut membuat perusahaan pers bisa mendapatkan modal asing karena perusahaan sudah terdaftar di pasar modal.<sup>100</sup> Buruknya, media massa di Indonesia dalam pemberitaannya dapat diatur oleh pemodalnya.

Pers telah masuk dalam era industri kapitalisme global, dan ada batasan-batasan struktural yang membuat tidak semua nilai-nilai ideal pers dapat diwujudkan. Ada sejumlah kompromi yang harus dilakukan dengan kaidah-kaidah pasar. Dengan kata lain, dinamika internal redaksi sebuah media di era pasca-Orde Baru tetap tidak sepenuhnya menjadi entitas yang otonom, karena ada kekuatan-kekuatan ekonomi yang turun mempengaruhinya.<sup>101</sup>

Industrialisasi pers berhubungan dengan monopoli Informasi, di mana informasi yang beredar kebanyakan dikuasai segelintir orang (*Cross Ownership* atau kepemilikan sekaligus atas berbagai macam media massa seperti Surat kabar, Televisi, Radio, dan lain-lain). Monopoli informasi tersebut dikarenakan adanya kelompok usaha media seperti *Kompas Gramedia*, *Media Nusantara Citra*, *Media Group*, *Jawa Pos*, dan lain-lain. Pers di Indonesia bukan lagi sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis independen yang *profit oriented* (berorientasi pada keuntungan).

---

<sup>99</sup> Lihat pasal 9 UU No. 40/1999 tentang pers.

<sup>100</sup> Lihat pasal 11 UU No. 40/1999 tentang pers.

<sup>101</sup> Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta; LKIS, 2001), h. 5

**BAB IV.**

**DINAMIKA MEDIA WATCH MENGONTROL MEDIA MASSA DI  
INDONESIA (2004-2014)**

**A. Pengawasan Pers Oleh *Media Watch* (Ragam dan Metode)**

Pers dalam menjalankan fungsi dan perannya tidak terlepas dari kontrol. Pengontrol pers bisa datang dari dua sisi, internal dan eksternal pers. Sisi internal datang dari diri wartawan, redaktur, pemimpin redaksi, dan lain-lain, Sedangkan yang eksternal adalah adanya peran serta masyarakat yang aktif (mendirikan *media watch*). Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pers di Indonesia mengalami perkembangan (globalisasi) yang sangat pesat.

Perkembangan pers di Indonesia akibat dari Globalisasi yang terjadi di dunia, sayangnya tidak selalu baik dan sehat. Kebebasan pers di Indonesia dianggap oleh sebagian masyarakat, “kebablasan”. Gangguan terhadap kebebasan pers tersebut merupakan urusan semua pihak, di mana *right to know* (hak untuk memperoleh informasi) dan *right to express* (hak untuk menyampaikan pendapat) di masyarakat terhambat akibat dari kebebasan pers yang kebablasan. Maka sudah menjadi fungsi dari media watch mengontrol pers yang kebablasan di Indonesia.

Menurut Sirikit Syah, perkembangan pers seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya berdampak terhadap kebutuhan masyarakat akan badan atau lembaga untuk mengontrol pers yang kebablasan.<sup>102</sup> Upaya *media watch* menjaga dan mengembangkan kebebasan pers ditempuh melalui sikap kritis dalam menghadapi

---

<sup>102</sup> St. Sularto, *Humanisme dan Kebebasan Pers : Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*, (Jakarta; Kompas, 2001), h. 134-135



keluaran media massa di tengah masyarakat di satu sisi, dan memberikan perhatian dan perlindungan bagi jurnalis yang menjalankan jurnalisme pada sisi lainnya. Seharusnya, dengan kehadiran *media watch* diperlukan juga adanya kesadaran dari pengelola media (Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, dan Wartawan) untuk bekerja sama menjalankan fungsinya kepada masyarakat dan jika ditemukan hal-hal yang berisi kegagalan pers dalam menjalankan fungsinya dapat diperbaiki lewat usulan-usulan *media watch*.<sup>103</sup>

Metode (*method*) berasal dari bahasa Latin dan juga Yunani, *methodus*, yang berasal dari kata *meta* yang berarti sesudah atau di atas, dan kata *hodos*, yang berarti suatu jalan atau suatu cara.<sup>104</sup> Metode secara harfiah berarti menggambarkan jalan atau cara suatu totalitas yang dicapai atau dibangun. Membahas mengenai metode yang digunakan *media watch*, memiliki kemiripan dengan kegiatan Literasi media yaitu memberikan suatu pengarahan kepada masyarakat untuk memilih berita yang dibutuhkan.

Perbedaan *media watch* dengan literasi media, yaitu *Media watch* mengambil sasaran langsung ke pengelola media massa (pemimpin umum, redaksi, dan wartawan). Maksudnya, mereka (*media watch*) membuat standar penilaian terhadap suatu media massa, dan penilaian itulah yang akan membantu konsumen media untuk mengakses media secara kritis. Sedangkan, literasi media memfokuskan pada khalayak (konsumen media) dengan tujuan membuat mereka kritis terhadap pemberitaan di media massa.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Ibid. h. 140

<sup>104</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 635

<sup>105</sup> Tim Peneliti, *Model-Model Gerakan Literasi Media dan Pemantauan Media di Indonesia*, (Yogyakarta; PKMBP & Tifa Foundation, 2013), h. 24

*Media watch* muncul dalam tampilan yang relatif baru. Fungsi dan kerja-kerja dari *media watch* sebenarnya merupakan hubungan fungsional dengan Dewan Pers dalam pembinaan pers di Indonesia. Praktek yang dilakukan *media watch* yaitu memantau pemberitaan suatu perusahaan pers dengan meriset berita-berita yang dimuat dalam penerbitannya. Dalam mengontrol pers di Indonesia, *media watch* tidak berhubungan langsung dengan media bersangkutan. Melainkan membuat Jurnal yang berisi dari analisa rutinitas pers yang dipantau, melakukan riset terhadap berita-berita yang menjadi kegelisahan tersebut.

Metode pengawasan pers oleh *media watch* adalah *Monitoring Pemberitaan*, yaitu melakukan pengamatan berita salah satu media massa yang dijadikan objek penelitian selama kurun waktu yang ditentukan masing-masing lembaga.<sup>106</sup> Perbedaan yang ada dalam metode *monitoring pemberitaan* dari masing-masing *media watch* ialah tema utama yang ingin dikembangkan sebelum dan sesudah proses pemantauan. Media Watch THC lebih memprioritaskan pemantauan pada berita-berita seputar politik dengan menerbitkan jurnal yang namanya sama dengan lembaga tersebut. Sebagai contoh, rubrik dalam jurnal terbitannya yang membahas pemberitaan Koran *Tempo*, *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia* pada topik berita tentang mengadili Soeharto pada tahun 2006.<sup>107</sup>

Remotivi mengedepankan pemantauan terhadap siaran-siaran di televisi dalam rangka menjaga dan mengembangkan kualitas siaran televisi di

---

<sup>106</sup> Ibid. h. 38

<sup>107</sup> “Mengadili Atau Tidak Mengadili Soeharto”, Jurnal Media Watch The Habibie Center Edisi No.46, 15 Juni-15 Juli 2006, h. 7-8

Indonesia.<sup>108</sup> Remotivi dengan membuat sebuah program pengawasan pers oleh masyarakat yang disebut Rapotivi, yaitu sebuah program bagi masyarakat untuk melaporkan keresahannya atas isi acara di suatu stasiun televisi. Rapotivi selain dapat dilakukan lewat surat elektronik ke Redaksi Remotivi juga dapat dilakukan dengan mengunggah menggunakan aplikasi yang diciptakan Remotivi (dengan nama Rapotivi) untuk pelaporan via telepon genggam atau *gadget* masing-masing warga yang ingin melapor. Sebagai contoh, kasus pelaporan yang sudah dilakukan tindakan lanjutannya oleh Remotivi ialah laporan dari akun @GalihBagus2 mengenai pemberitaan salah Reportase Sore dari Trans TV mengenai berita pacaran di kalangan anak sekolah dasar dengan penyantuman ilustrasi foto yang salah. Ditambahkan oleh akun tersebut, karena ilustrasi gambar tersebut sebelumnya sudah ada yang mengklarifikasi tidak benar tetapi masih tetap ditayangkan oleh Reportase Sore.<sup>109</sup>

Riset yang dilakukan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dalam buku *Model-Model Gerakan Literasi Media dan Pemantauan Media di Indonesia* (2013) bisa menjadi gambaran. Jika dibaca dari riset tersebut, arah gerak *media watch* terbagi menjadi dua. Pertama, gerak vertikal. Pemantauan terhadap konten-konten berita dan advokasi atas regulasi atau kebijakan publik yang berkaitan dengan media. Mereka menganalisis media dan memberikan standar penilaian atas konten-konten tersebut. *media watch* yang seperti itu disebutkan dalam buku tersebut ialah YLKM, KIPPAS, Media Watch THC, Lembaga Studi Pers dan Informasi (LeSPI), Pemantau Regulasi dan Regulator

---

<sup>108</sup> Tim Peneliti.Op.cit. h. 56

<sup>109</sup> <http://www.rapotivi.org/index.php?r=home/arsip&id=68> (5 Februari 2018)

Media (PR2Media), dan Remotivi. Masing-masing memiliki fokus yang berbeda dengan memantau televisi, media cetak, maupun regulasi yang ada.

Kedua, gerak horizontal. Pemberdayaan masyarakat sebagai basis awal untuk melakukan literasi media menjadi perhatian. Tujuannya, menjadi masyarakat kritis dan mampu menganalisis pesan-pesan yang muncul di media. Dengan begitu masyarakat bisa menjadi khalayak aktif dalam merespon banjir informasi yang ada media. Lembaga pemantau yang bergerak secara horizontal ini memiliki sasaran dan target yang beragam. Masyarakat Peduli Media (MPM), misalnya menasar ibu-ibu rumah tangga sebagai tema literasi medianya. Rumah Sinema melakukan kegiatan literasi media dengan berfokus pada pelajar di tingkat sekolah menengah. Early Childhood Care and Development-Resource Centre (ECCD-RC) memberikan perhatian pada anak-anak usia dini dan dasar. Sementara Centre for Lead (CFL) menjadikan pondok pesantren sebagai basis gerakan literasi media.

Peran dari *media watch* sebenarnya mirip dengan kerja-kerja Dewan Pers, yaitu masyarakat dapat memberikan laporan mengenai pemberitaan yang tidak baik di media massa. *media watch* menjembatani pelaksanaan hak jawab kepada korban pemberitaan pers, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak jawab dan membuat tulisan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Kritik dan saran *media watch* dalam konteks membuat analisis dan riset, sifatnya tidak memaksa atau menekan pers, dan hasil riset tersebut bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk media massa bersangkutan tergantung pihak pengelola pers mengikuti isi kritik atau tidak.

Kesimpulannya, lembaga-lembaga *media watch* hadir di kehidupan pers Indonesia atas pandangan bahwa yang perlu dijaga dan didukung bukanlah pers dan para jurnalisnya, melainkan kebebasan pers. Sebab, media massa dan jurnalisnya dapat terjerumus menjadi bagian dari “kejahatan” politik dan ekonomi. Gangguan terhadap kebebasan pers ini kerusakannya tidak hanya dilihat pada lingkungan suatu masyarakat, tetapi lebih jauh yaitu kerugian terhadap perkembangan negara Indonesia.

## **B. Jurnalisme Kuning Menimbulkan Keresahan Publik**

Pers yang bebas ternyata tidak otomatis menciptakan pers yang sehat. Indonesia adalah contoh nyata dari fenomena itu. Kendati indeks kemerdekaan pers berdasar standar *Reporter sans Frontiers* (Paris) di Indonesia mulai melorot di akhir jabatan Presiden Abdurrahman Wahid (2001) dan terus berlanjut di era Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah kalangan sepakat bahwa pers di Indonesia relatif lebih bebas dibandingkan sejumlah negara di Asia.<sup>110</sup>

Reformasi politik yang dilakukan B.J. Habibie hingga memunculkan fenomena baru untuk sebuah negara berkembang atau dunia ketiga dalam urusan kebebasan pers,<sup>111</sup> dilanjutkan dengan keputusan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membubarkan Departemen Penerangan (Deppen) ternyata tidak menghasilkan pers yang sehat. Pers yang tumbuh pada era Reformasi kebanyakan mereka (perusahaan pers) yang menggunakan praktek Jurnalisme Kuning, yaitu suatu penyajian teknik jurnalistik yang isinya tidak ada hubungannya dengan

<sup>110</sup> Teguh Apriliyanto, “Refleksi Sepuluh Tahun Kemerdekaan Pers: Tantangan Serius Justru Dari Dalam”, dalam Jurnal Media Watch The Habibie Center Edisi No. 73 Tahun 2009, h. 11

<sup>111</sup> Ahmad Watik Pratiknya, DKK, *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J.Habibie*, buku satu : *Ekonomi dan Politik*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 230-231

kepentingan publik<sup>112</sup> yang mengeksploitasi hal-hal berbau seks, kekerasan, dan lain-lain serta penggunaan bahasa yang tidak formal dan vulgar atau tidak lazim.

Sejarah mencatat, kehadiran Jurnalisme Kuning di Indonesia sejak Harmoko (Mantan Menteri Penerangan periode 1983-1997) mendirikan *Harian Pos Kota* pada tahun 1970. *Harian Pos Kota* dalam penyajian beritanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat (dalam artian menggunakan bahasa sehari-hari masyarakat). Hal tersebut membuat *Harian Pos Kota* menjadi surat kabar pilihan masyarakat menengah ke bawah, tetapi perkembangannya pada era Reformasi Jurnalisme Kuning menjadi jenis penyajian berita yang digunakan banyak perusahaan pers menyebabkan kemunduran kualitas pers di Indonesia.

Sajian yang menonjol pada aspek judul, peristiwa kejahatan seringkali diberitakan secara kronologis dan mendetail: nama korban perkosaan tidak menggunakan inisial, berita pembunuhan ditulis dengan sadis, juga visual yang mengiringi berita. Iklan-iklan yang dipasang di koran-koran semacam ini juga mendukung kesan sensasional.<sup>113</sup> Misalnya, penawaran jasa memperbesar alat vital, jasa klenik untuk membuat orang lain jatuh cinta, sampai pijat ‘esek-esek’. Pers atau Jurnalisme Kuning, konsekuensinya dari konstruksi sensasionalisme pada berita-berita kriminal, seringkali wartawan yang meliput dan menulis berita kurang mematuhi kode etik jurnalistik dan bahkan Undang-Undang (Pers).

---

<sup>112</sup> Amir Effendi Siregar, “*Meningkatkan Profesionalisme Wartawan: Bekerja Untuk Publik Dengan Obyektif, Independen, dan Netral*”, dalam pengantar Jurnal Dewan Pers Edisi No. 11 tahun 2015, h. XII

<sup>113</sup> Sensationalism is a type of editorial bias in mass media in which events and topics in news stories and pieces are overhyped to present biased impressions on events, which may cause a manipulation to the truth of a story. <https://en.wikipedia.org/wiki/Sensationalism> (10 Januari 2018)

Wartawan dituntut menulis berita sekreatif mungkin menggunakan kata-kata membentuk kalimat yang laku di pasaran.

Karakteristik lainnya dari Jurnalisme Kuning adalah Aspek visual yang digunakan antara lain *scare-heads: headline* yang memberikan efek menyeramkan, biasanya ditulis dalam ukuran font yang sangat besar, dicetak dengan warna hitam atau merah. Seringkali materinya berisi berita-berita yang tidak/kurang penting. Penggunaan visualisasi foto dan gambar yang berlebihan. Jurnalisme kuning juga kerap memfokuskan pemberitaannya pada isu-isu kontroversial yang memancing perdebatan. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca terutama pembaca dari kalangan menengah ke bawah. Isu-isu tersebut biasanya berkaitan dengan *sex, conflict, and crime* (seks, konflik, dan kriminal).

Pers yang menggunakan Jurnalisme Kuning sebagai metode jurnalistiknya, jumlahnya terhitung banyak. Sebagai contoh, Harian *Lampu Merah* ( berganti jadi *Lampu Hijau* pada tahun 2008), *Posmetro*, dan *Meteor* yang tumbuh sejak berlangsungnya era Reformasi. Jurnalisme Kuning yang masih bertahan sampai sekarang selain dari *Pos Kota* yaitu Harian *Lampu Hijau*, hal tersebut dikarenakan masalah finansial masing-masing perusahaan pers.

Tugas dari pengamat media (lembaga *media watch*) dalam mencatat dan mengingatkan, tanpa bosan-bosan, bahwa media massa memiliki *privilege* untuk memilih yang akan dimuat atau disiarkannya. *privilege* tersebut seharusnya digunakan untuk kebaikan masyarakat bukan kepentingan ekonomi perusahaan persnya saja, dan media massa seharusnya mengetahui efek berita terhadap

pemikiran dan perilaku masyarakat.<sup>114</sup> Sirikit Syah berpendapat bahwa pers yang seharusnya menjadi *watch dog* (Anjing penjaga istilah untuk fungsinya sebagai kontrol sosial) pada era Reformasi menjadi *wild dog* (Anjing liar).<sup>115</sup>

Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih konten-konten yang disajikan media massa, jika tidak berkenan diharapkan dapat melakukan kewenangan kontrol pers terhadap media yang bersangkutan atau melakukan pelaporan ke Dewan Pers atau kepada lembaga *media watch*. Berbagai teknik sensasi dilakukan oleh Jurnalisme Kuning semata-mata dengan pertimbangan bisnis agar korannya menarik dan laku.

Hal ini dilakukan dengan mengabaikan adanya prinsip-prinsip jurnalistik yang sebetulnya juga berlaku bagi media massa apapun jenis dan variannya. Kebebasan pers dan berekspresi serta jarang adanya lembaga yang khusus mengawasi Jurnalisme seperti itu menjadi celah bagi pengguna Jurnalisme Kuning.

Dewan Pers sendiri terkesan bimbang dalam menilai apakah pemberitaan koran-koran kuning masuk dalam kategori pers atau bukan. Padahal jelas-jelas dengan produk berupa informasi terlebih jika berhubungan dengan persoalan hukum, koran-koran kuning ini merupakan bagian dari pers yang mestinya memiliki fungsi edukasi bukan menyesatkan dan memberitakan kabar bohong atau palsu.

---

<sup>114</sup> Sirikit Syah dalam menanggapi Jurnalisme Kuning yang meledak pada Era Reformasi, <https://indonesianmediawatch.wordpress.com/2011/09/17/jurnalisme-halaman-depan/#more-853> (10 Januari 2018)

<sup>115</sup> <https://sirikitsyah.wordpress.com/mediawatch/watch-the-dog/> (10 Januari 2018)



### C. Pers Partisan Pada Pemilihan Umum Di Era Reformasi

Pers Partisan merupakan sebuah konsep bahwa media massa tidak dipandang lagi sebagai sebuah bidang yang berdiri sendiri. UU Pers era Reformasi yang menjabarkan bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum dan kepemilikan modal diatur dalam pasar modal,<sup>116</sup> mengakibatkan kekuatan ekonomi-politik muncul dan mempengaruhi pers di Indonesia setelah kejatuhan rezim Orde Baru (selanjutnya disingkat Orba).

Proses transisi masa kepemimpinan B.J. Habibie, yang terjadi di Indonesia juga berpengaruh terhadap praktek media massa. Reformasi pada alam pers Reformasi ternyata seringkali terpaksa harus berkompromi dengan berbagai kepentingan politik karena kepemilikan modal dimiliki oleh anggota dari salah satu partai politik (selanjutnya disingkat Parpol).<sup>117</sup> Kepentingan pemilik modal yang berafiliasi dengan Parpol sebenarnya tidak dilarang tetapi tidak menutup kemungkinan dapat menciderai kepentingan publik, artinya pers dijadikan sebagai alat komunikasi politik Parpol. Hal tersebut menyebabkan pers di Indonesia pada era Reformasi kembali memiliki corak pers partisan (sebelumnya pada masa Orde Lama).

Pers Partisan adalah pers yang mengabdikan kepada kepentingan Parpol tertentu bukanlah pers seperti yang dimaksud dalam Undang-undang No. 40/1999 Tentang Pers (selanjutnya disingkat UU Pers) dan tidak layak mendapatkan keistimewaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pers tersebut.

---

<sup>116</sup> Lihat UU No. 40/1999 pada bab tentang perusahaan pers

<sup>117</sup> Hermin Indah Wahyuni, “Politik Media Dalam Transisi Politik: Dari Kontrol Negara Menuju Self-Regulation Mechanism”, dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 4 No. 1, Juni 2007, Universitas Gajah Mada, h. 14

Dalam pandangan Foucault, hubungan-hubungan kekuasaan yang merasuki dan membentuk struktur suatu masyarakat tidak dapat disusun, diwujudkan, dan dimapankan tanpa berfungsinya wacana-wacana kebenaran yang berpusat pada wacana-wacana ilmiah serta institusi-institusi yang memproduksinya. lanjut Foucault, persoalan yang timbul kemudian adalah tafsir terhadap wacana kebenaran cenderung menjadi "hak prerogatif" kelompok-kelompok dominan itu dan kelompok-kelompok di luar mereka cenderung ditundukan untuk turut memapankan wacana kebenaran itu dengan tendensi untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka.<sup>118</sup>

Penjelasan dari Foucault tersebut dapat diartikan bahwa pers partisan yang terjadi pada masa Reformasi dapat mengganggu kepentingan publik. Pers partisan yang muncul adalah akibat kepemilikan media oleh individu yang berkecimpung dalam dunia politik seperti Surya Paloh yang merupakan politisi dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) sekaligus pendiri dan pemilik dari PT. Media Group yang menaungi media massa seperti Metro Tv, dan Media Indonesia. Berikutnya adalah Aburizal Bakrie yang merupakan presiden utama dari Bakrie Group yang menaungi TV One, Andalas TV (ANTV). Dapat dipastikan porsi pemberitaannya menguntungkan kepentingan politik mereka daripada publik sendiri.

Praktek dari corak pers partisan dapat kita lihat pada saat Pemilu berlangsung. Pada saat Pemilu, pertarungan wacana politik oleh masing-masing Parpol dapat ditemukan dalam media-media massa di Indonesia. Pertarungan wacana itu meliputi Program kerja yang dicetuskan, prestasi-prestasi dari perwakilan Parpol yang ikut dalam Pemilu, dan lain-lain. Liputan-liputannya bahkan tidak sedikit yang menyindir dan menjelekkkan lawan politik dari Parpol bersangkutan. Penyampaian pesan politik di media massa suatu perusahaan pers,

---

<sup>118</sup> Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan wacana*, cetakan ketiga, (yogyakarta; LKIS, 2013), h. 117

digunakan “strategi persuasi” sebagai teknik penyampaian pesan melalui kampanye, propaganda dan penggalangan opini publik. Menurut Dan Nimmo, strategi persuasi tersebut merupakan suatu alat yang dipergunakan oleh kelompok terorganisasi, untuk menjangkau individu-individu yang secara psikologis dimanipulasi dan digabungkan ke dalam organisasi.<sup>119</sup>

Secara umum, Pers Partisan dipahami sebagai jaringan hubungan antara aktor ekonomi-politik, yang berkepentingan terhadap proses pengembangan wacana dalam sebuah media tertentu. Artinya, ketika pers telah diintervensi kepentingan pribadi pemilik media yang berkecimpung di dunia politik, maka kita tidak akan pernah menemukan pemberitaan yang benar-benar bersifat netral pada masa Pemilu berlangsung. Kekuatan pemilik modal dalam pemasangan iklan politik di media, bukan ditujukan bagi kepentingan pembaca atau pemirsa, tetapi justru lebih diupayakan bagi kepuasan pemodal dan elit politik.

Pers Partisan seperti yang dijelaskan sebelumnya, dapat kita lihat pada media massa dari MNC Group, ketika Hari Tanosoedibjo berkoalisi dengan Wiranto pada saat Pemilu 2014 berlangsung. Media massa elektronik yang merupakan naungan dari MNC Group, RCTI, menampilkan koalisi Hari Tanoesoedibjo dan Wiranto dengan porsi yang banyak. Seperti membuat acara kuis Pemilu berjudul WIN-HT yang memiliki jadwal tayang rutin pada waktu tertentu.

Kasus lainnya adalah pada masa perhitungan cepat surat suara Pemilu 2014. TV One yang merupakan stasiun televisi milik Aburizal Bakrie, mendukung

---

<sup>119</sup> Dan Nimmo, *komunikasi politik: komunikator, pesan dan media*, Cetakan kedua, terjemahan Tjun Surjaman, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2007),h. 125

duet Prabowo-Hatta. Perhitungan cepat yang dilakukan di stasiun televisi tersebut memenangkan duet Prabowo-Hatta, sedangkan Metro TV stasiun televisi dari PT. Media Group kepemilikan Surya Paloh pada saat itu mendukung duet Jokowi-JK memenangkan duet tersebut. Kedua pihak stasiun televisi tersebut mencoba merekayasa opini publik untuk kemenangan duet yang didukung Aburizal Bakrie dan yang didukung Surya Paloh. Hal tersebut menjadikan alam pers Indonesia menjadi panggung politik dengan pertarungan wacana masing-masing elit politik.

#### **D. Kondisi Pers di Indonesia Setelah Lima Belas Tahun Kemunculan Media Watch**

Keberadaan pers yang profesional adalah syarat penting bagi kehidupan demokrasi. Demokrasi dapat terwujud jika pers yang merdeka berkerja secara optimal. Oleh karena itu, di negara-negara demokrasi kemerdekaan pers dijamin karena dengan memiliki kemerdekaannya, pers bisa berperan optimal dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan baik.

Pertumbuhan pers selama lima belas tahun dapat dikatakan naik turun atas faktor finansial perusahaan, namun yang pasti kebebasan pers yang diraih pada era Reformasi ini menyebabkan jumlah pers yang ada di Indonesia meningkat daripada saat rezim Orba berkuasa.<sup>120</sup> Akan tetapi, pertumbuhan media massa selama lima belas tahun Reformasi berlangsung dengan banyaknya pertumbuhan media-media massa baru (yang dijelaskan pada tabel di atas) dapat dikatakan buruk. Pers adalah mekanisme kontrol yang sangat krusial dalam sebuah

---

<sup>120</sup> Pertumbuhan jumlah pers cetak dan elektronik antara tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada tabel 1.

masyarakat modern.<sup>121</sup> Namun, hasil dari perkembangan teknologi yang semakin canggih tantangan yang dihadapi bukan lagi masalah kekerasan terhadap wartawan yang pada masa awal Reformasi marak terjadi di Indonesia. Melainkan, upaya mencegah nilai-nilai buruk dalam arus globalisasi pada pers tidak merusak moral bangsa.

Hal-hal diatas menimbulkan kebutuhan publik akan badan atau lembaga untuk mengurus pers, karena kinerja Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia saja tidak mencukupi mengawasi pers yang jumlahnya banyak sekali. *Media watch* muncul karena tuntutan zaman era Reformasi yang melenceng seperti yang dijelaskan. Manifestasi keresahan publik tersebut, *media watch* ada untuk melihat media serta segenap tingkah laku jurnalistiknya secara kritis. Keberadaannya penting untuk mengukur objektivitas praktek jurnalistik baik berita maupun berbagai kepentingan di balik pemilik modal yang dilakukan oleh media.

Adanya keberagaman fokus pemantauan yang dilakukan beberapa *media watch* di Indonesia dan setelah lima belas tahun *media watch* muncul dalam alam pers Reformasi, dapat dikatakan pengaruh yang diberikan tidak begitu banyak, mungkin cenderung tidak kelihatan. Penyebabnya ialah masih banyaknya masyarakat yang masih belum melek media dan akibat dari kepentingan pemilik modal dan elit politik dalam mewarnai berita-berita yang diedarkan ke khalayak umum.

---

<sup>121</sup> Samsuri, *Problematika Kemerdekaan Pers di Indonesia*, (Jakarta; Dewan Pers, 2009), h. 27

Hal yang menyebabkan kehadiran *media watch* tidak terlihat pengaruhnya adalah sejak Undang-Undang No. 40/1999 Tentang Pers diundangkan hingga sekarang, Jurnalisme Kuning dan Pers Partisan masih bisa kita lihat di alam pers Indonesia. Sebagai contoh, Harian *Lampu Merah* diprotes pengamat media dan sudah pernah mendapat tindakan peringatan dari Dewan Pers, ternyata sejak tahun 2008 hingga sekarang hanya berganti namanya saja menjadi *Lampu Hijau* sedangkan penyajian beritanya masih bercirikan Jurnalisme Kuning. penyajian judul berita pada Harian *Lampu Hijau* adalah edisi Kamis 4 Juli 2013, “Denger Ortu Ribut Ama Tetangga Kakak-Adik Marah, Tetangga Dibacok”.<sup>122</sup> Lainnya, pada edisi sabtu 8 Februari 2014, “Cewek Dicegat 3 Cowok Ngaku Polisi, Si Cewek Dituduh Jadi Pengedar Sabu, Diseret Masuk Mobil, Diperkosa Marathon”.<sup>123</sup> Harian *Lampu Hijau* jelas tidak memperdulikan kaidah-kaidah yang terkandung dalam KEJ.<sup>124</sup>

Pers partisan pun juga masih bisa kita lihat ketika memasuki tahun-tahun politik ketika Pemilu di selenggarakan, seperti pada waktu program kuis WIN-HT yang tayang di *RCTI*, *MNC Tv*, dan *Global Tv* pada waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwalkan, menjelaskan media televisi masih dipakai sebagai ajang kampanye politik (pers partisan) dari partai politik, yang seharusnya pada saat pemilu berlangsung liputan yang ada di media massa harus berimbang mengenai parpol yang ikut dalam pemilu.

---

<sup>122</sup> Lihat Gambar 1

<sup>123</sup> Lihat Gambar 2

<sup>124</sup> Lihat Kode Etik Jurnalistik dari Dewan Pers Pasal 4 mengenai wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

## **BAB V.**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari kehadiran lembaga *media watch* (1999-2014) pada era Reformasi sangat dibutuhkan. Hal ini terkait dengan kondisi pers pada masa Reformasi yang terlampau bebas dalam menjalankan profesinya. Praktek pers setelah meruntuhkan rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 dapat dikatakan melenceng.

Pers Reformasi dapat dikatakan membingungkan dengan segala faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pemahaman tentang kebebasan pers di Indonesia, perubahan paradigma pengawasan pers, serta kepemilikan modal swasta terhadap perusahaan pers di Indonesia.

Selama lima belas tahun Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers diundangkan oleh pemerintah di era Reformasi, pers pada suatu waktu menjalankan fungsinya, dan pada waktu tertentu menjadi masalah dalam perkembangan masyarakat di era Reformasi. Hal tersebut dapat terjadi karena pers yang tumbuh pada masa Reformasi yaitu Jurnalisme Kuning dan Pers Partisan. Dua jenis jurnalisme tersebut yang dipilih peneliti sebagai faktor-faktor turunnya kualitas pers pada masa Reformasi (1999-2014).

*Media watch* adalah lembaga independen yang didirikan oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pers yang dijabarkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada pasal 17. Tugas dari media watch adalah memberikan masukan kepada pengelola media massa atas pemberitaan yang

disiarkannya. Hal itu dilakukan karena sebelumnya ada indikasi penyalahgunaan (Jurnalisme Kuning dan Pers Partisan) yang dilakukan pengelola pers.

Hasil penelitian mengenai media watch di era Reformasi ini menemukan bahwa kemunculan media watch tidak populer bahkan hingga sekarang pengaruhnya tidak kelihatan. Hal tersebut dikarenakan semangat zaman kebebasan pers yang baru lepas dari kediktatoran Soeharto. *Media watch* dianggap ingin meneruskan praktek penyensoran seperti yang dilakukan rezim Orde Baru terhadap pers. Ketidakpopuleran *media watch* menyebabkan kurang optimalnya fungsi dari lembaga pemantau media dalam mengawasi isi media massa Indonesia pasca Orde Baru.

Kehadiran lembaga-lembaga media watch seperti Media Watch The Habibie Center, dan Remotivi sebenarnya dapat meredam penyimpangan pers seperti Jurnalisme Kuning dan Pers Partisan di masa Reformasi, jika ada dukungan dari pihak pengelola media (Pemimpin Umum, Redaksi, Wartawan dan Pemilik Modal) dengan memberikan ruang terhadap usulan-usulan (hasil dari praktek pengawasan yang dilakukan dengan cara *Monitoring pemberitaan*) dari media watch dalam rangka evaluasi terhadap pemberitaan yang dilakukan media massa bersangkutan.

Jurnalisme Kuning yang berkembang pesat dan menjadi penyajian berita yang populer dilakukan media-media massa baru adalah sebuah kemunduran kualitas pers di Indonesia selama lima belas tahun masa Reformasi berlangsung. Sirikit Syah berpendapat, mereka (Jurnalisme Kuning) tidak menjalankan fungsi



pers sebagai *Watch Dog*, melainkan menjadi *Wild Dog* yang dampaknya dapat merusak kemerdekaan pers di Indonesia dan merusak moral bangsa.

Kebebasan pers era Reformasi juga dimanfaatkan oleh oknum elit politik. Sajian berita di media massa yang seharusnya untuk kepentingan publik, dimanfaatkan menjadi kepentingan politiknya para elit politik. Hal itu didasari atas kepemilikan modal media massa pada era Reformasi banyak dimiliki oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen:

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, Arsip Dokumen Dewan Pers.

Surat Edaran Persatuan Wartawan Indonesia mengenai Kode Etik Wartawan Indonesia.

### Buku:

Abdul Manan, Dkk. 2014. *Semangat Sinargalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.

Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKIS.

Ahmad Watik Pratiknya, DKK. 1999. *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J.Habibie, buku satu : Ekonomi dan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Atmakusumah. 2009. *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*. Jakarta: Spasi & VHS Book.

Bambang Bujono, DKK. 1995. *Mengapa Kami Menggugat*. Jakarta: Yayasan Alumni TEMPO.

Bayu Wahyono, DKK. 2011. *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi: Studi Evaluatif terhadap peran Regulator Media dan*

*Komunikasi dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia.*

Yogyakarta: PR2Media & Tifa Foundation.

B.J. Habibie. 2006. *Detik-detik yang Menentukan*. Jakarta: THC Mandiri.

Chris Manning dan Peter Van Diermen. 2000. *Indonesia di Tengah*

*Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*. Yogyakarta;

LKIS.

Denny, J.A. 2006. *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia*.

Yogyakarta: LKIS.

Edi Susanto. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Feith, Herbeth. 2007. *The Decline of Constitutional Democracy In*

*Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.

Irwan Suhanda. 2010. *Gus Dur Santri Par Excellence*. Jakarta: Kompas.

Jakob Oetama, 2001. *Pers Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Kazhim, Musa. 1998. *Menuju Indonesia Baru; Menggagas Reformasi*

*Total*. Bandung: Pustaka Hidayah.

K.H, Ramadhan. 1995. *Mochtar Lubis Bicara Lurus: Menjawab*

*Pertanyaan Wartawan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kustadi Suhandang(ed.). 1978. *An introduction to Journalism*. Bandung:

Karya Nusantara.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lorens Bagus. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lukas Luwarso, DKK. 2008. *Mengelola Kebebasan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.

Magnis-Suseno, Franz. 2001. *Kuasa Dan Moral* (cetakan kelima). Jakarta: Gramedia.

\_\_\_\_\_. 1995. *Mencari Sosok Demokrasi*. Jakarta: Gramedia.

Muhamad Hisyam (ed.). 2003. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nimmo, Dan. 2007. *komunikasi politik: komunikator, pesan dan media*, Cetakan kedua, terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Oka Kusumayudha. 1987. *Pemasyarakatan Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

Panitia Hut PWI. 2001. *PWI 55 Tahun: Menegakkan Profesionalisme & Etika Pers di Era Multimedia*. Jakarta: Metro Pos.

Rachmadi, F. 1990. *Perbandingan Sitem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: Gramedia.

- Ricklefs, MC. Husni Syawie (ed.).2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Robison, Richard. 1984. *Sejarah Politik Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Sabam Leo Batubara. 2009. *Indonesia Bergulat Dalam Paradoks*. Jakarta: Dewan Pers.
- Samsuri. 2009. *Problematisasi Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Siebert, Fred S. Peterson, Theodore. Schramm, Wilbur. 1986. *Empat Teori Pers*. Jakarta: Intermasa.
- Sihombing, Frans Bona. 1984. *Demokrasi Pancasila Dalam Nilai-Nilai Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Soebijono, dkk. 1995. *Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sularto, St. 2001. *Humanisme dan Kebebasan Pers : Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*. Jakarta: Kompas.
- Tim Peneliti. 2013. *Model-Model Gerakan Literasi Media dan Pemantauan Media di Indonesia*. Yogyakarta: PKMBP & Tifa Foundation.

Tribuana Said. 1988. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: CV HAJI MASAGUNG.

Wiryanto. 2000. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Grasindo.

**Jurnal:**

Denico Doly. *Urgensi Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*.( Jurnal Negara Hukum DPR Vol 4 No. 2 November). 2013.

Hasan, M. Nur. *Tantangan Demokrasi di Indonesia*.(Jurnal Aspirasi Magister Ilmu Hukum Trisakti, XVI No. 1 Juli). 2006.

Hermin Indah Wahyuni. *Politik Media Dalam Transisi Politik: Dari Kontrol Negara Menuju Self-Regulation Mechanism*.(Jurnal Ilmu Komunikasi UGM Volume 4 No. 1 Juni ). 2007.

Joko Martono. *Kebebasan Pers di Indonesia Pada Era Reformasi dan Ekonomi Politik Media*.(Jurnal INSANI STISIP. Vol. 1 No. 1 Desember). 2014.

*Mengadili Atau Tidak Mengadili Soeharto*.(Jurnal Media Watch The Habibie Center Edisi No.46). 2006.

M. Syahri. *Intervensi Pemerintah Terhadap Kebebasan Pers dan Munculnya Eufimisme*, (Prosiding Seminar Akademik UNM Vol 2). 2002.

Saptohadhi, Satrio. *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*.(Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari). 2011.

Siregar, Amir Effendi. *Meningkatkan Profesionalisme Wartawan: Bekerja Untuk Publik Dengan Obyektif, Independen, dan Netral*.(Jurnal Dewan Pers Edisi No. 11). 2015.

Tim Peneliti. *Kasus Trisakti, Semanggi I dan II : Penantian Dalam Ketidakpastian*.(Kertas Posisi KONTRAS. Desember). 2005

Teguh Apriliyanto. *Refleksi Sepuluh Tahun Kemerdekaan Pers: Tantangan Serius Justru Dari Dalam*.(Jurnal Media Watch The Habibie Center Edisi No. 73). 2009.

#### **Internet:**

Profil organisasi Lembaga Konsumen media  
(<https://www.indonesiamediawatch.wordpress.com/profile/>).

Diakses pada 27 November 2016. Pkl. 21.22 WIB

Andreas Harsono. *Blok*  
(<http://www.andreasharsono.net/2011/07/blokm.html>).

Diakses pada 11 oktober 2017. Pkl. 22.12 WIB

Wisnu Prasetya Utomo. *Mempertanyakan Peran Pemantau Media*  
(<http://www.remotivi.or.id/amatan/48/Mempertanyakan-Peran-Pemantau-Media>)

Diakses pada 3 November 2017. Pkl. 23.30 WIB

Pengertian Sensasionalisme. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Sensationalism>),  
Diakses pada 10 Januari 2018. Pkl. 22.10 WIB

Tulisan mengenai fenomena tulisan Headline pada media massa.  
 (<https://indonesianmediawatch.wordpress.com/2011/09/17/jurnalisme-halaman-depan/#more-853>). Diakses pada 10 Januari 2018. Pkl. 22.40 WIB

Sirikit Syah, *Watch The Dog*  
 (<https://sirikitsyah.wordpress.com/mediawatch/watch-the-dog/>).

Diakses pada 10 Januari 2018. Pkl. 22.50 WIB

Redaksi, Jurnalisme Tidak Ramah Gender  
 (<https://kipas.wordpress.com/2007/06/29/jurnalisme-tidak-ramah-gender/>). Diakses pada 5 Februari 2018. Pkl. 17.56 WIB

Profil dari Remotivi. (<http://www.remotivi.or.id/konten/1/profil>). Diakses pada 5 Februari 2018. Pkl. 19.20 WIB

Laporan Masyarakat terhadap pemberitaan di acara Reportase Sore Trans TV. (<http://www.rapotivi.org/index.php?r=home/arsip&id=68>). Diakses pada 5 Februari 2018. Pkl. 20.32 WIB



# LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Lampu Hijau Edisi Kamis, 4 Juli 2013



Gambar 2. Lampu Hijau Edisi Sabtu, 5 Februari 2014

**REKAPITULASI PENDATAAN PERS MEDIA CETAK  
TAHUN 2010**

No.	Provinsi	Harian	Mingguan	Bulanan	Total
1	Berbagai Aceh Darussalam	8	2	-	10
2	Sumatera Utara	33	45	4	82
3	Sumatera Barat	4	21	1	26
4	Riau	33	10	1	44
5	Kalimantan Utara	5	4	-	9
6	Jambi	13	4	-	17
7	Bengkulu	5	-	-	5
8	Sulawesi Selatan	10	5	1	16
9	Sulawesi Tengah	5	1	-	6
10	Lampung	13	1	-	14
11	Banten	3	1	2	6
12	DI Yogyakarta	15	142	143	270
13	Jawa Barat	11	10	11	32
14	Jawa Tengah	11	4	5	20
15	DI Yogyakarta	5	1	1	7
16	Jawa Timur	14	15	8	37
17	Bali	5	4	23	32
18	Nusa Tenggara Barat	4	2	1	7
19	Nusa Tenggara Timur	5	3	1	9
20	Kalimantan Barat	5	1	1	7
21	Kalimantan Selatan	5	1	1	7
22	Kalimantan Tengah	5	1	1	7
23	Kalimantan Timur	5	1	1	7
24	Sulawesi Barat	5	1	1	7
25	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
26	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
27	Sulawesi Utara	5	1	1	7
28	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
29	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
30	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
31	Sulawesi Utara	5	1	1	7
32	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
33	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
34	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
35	Sulawesi Utara	5	1	1	7
36	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
37	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
38	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
39	Sulawesi Utara	5	1	1	7
40	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
41	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
42	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
43	Sulawesi Utara	5	1	1	7
44	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
45	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
46	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
47	Sulawesi Utara	5	1	1	7
48	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
49	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
50	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
51	Sulawesi Utara	5	1	1	7
52	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
53	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
54	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
55	Sulawesi Utara	5	1	1	7
56	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
57	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
58	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
59	Sulawesi Utara	5	1	1	7
60	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
61	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
62	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
63	Sulawesi Utara	5	1	1	7
64	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
65	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
66	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
67	Sulawesi Utara	5	1	1	7
68	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
69	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
70	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
71	Sulawesi Utara	5	1	1	7
72	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
73	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
74	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
75	Sulawesi Utara	5	1	1	7
76	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
77	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
78	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
79	Sulawesi Utara	5	1	1	7
80	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
81	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
82	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
83	Sulawesi Utara	5	1	1	7
84	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
85	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
86	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
87	Sulawesi Utara	5	1	1	7
88	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
89	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
90	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
91	Sulawesi Utara	5	1	1	7
92	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
93	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
94	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
95	Sulawesi Utara	5	1	1	7
96	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
97	Sulawesi Tengah	5	1	1	7
98	Sulawesi Tenggara	5	1	1	7
99	Sulawesi Utara	5	1	1	7
100	Sulawesi Selatan	5	1	1	7
TOTAL		288	389	217	894

FAKTA | Data Pers Nasional 2010

**REKAPITULASI PENDATAAN PERS RADIO DAN TELEVISI  
TAHUN 2010**

No.	Provinsi	Radio	Televisi	Total
1	Berbagai Aceh Darussalam	10	1	11
2	Sumatera Utara	5	1	6
3	Sumatera Barat	10	1	11
4	Riau	5	1	6
5	Kalimantan Utara	5	1	6
6	Jambi	5	1	6
7	Bengkulu	5	1	6
8	Sulawesi Selatan	10	1	11
9	Sulawesi Tengah	5	1	6
10	Lampung	5	1	6
11	Banten	5	1	6
12	DI Yogyakarta	10	1	11
13	Jawa Barat	5	1	6
14	Jawa Tengah	10	1	11
15	DI Yogyakarta	10	1	11
16	Jawa Timur	10	1	11
17	Bali	5	1	6
18	Nusa Tenggara Barat	5	1	6
19	Nusa Tenggara Timur	10	1	11
20	Kalimantan Barat	10	1	11
21	Kalimantan Selatan	10	1	11
22	Kalimantan Tengah	10	1	11
23	Kalimantan Timur	10	1	11
24	Sulawesi Barat	10	1	11
25	Sulawesi Tengah	10	1	11
26	Sulawesi Tenggara	10	1	11
27	Sulawesi Utara	10	1	11
28	Sulawesi Selatan	10	1	11
29	Sulawesi Tengah	10	1	11
30	Sulawesi Tenggara	10	1	11
31	Sulawesi Utara	10	1	11
32	Sulawesi Selatan	10	1	11
33	Sulawesi Tengah	10	1	11
34	Sulawesi Tenggara	10	1	11
35	Sulawesi Utara	10	1	11
36	Sulawesi Selatan	10	1	11
37	Sulawesi Tengah	10	1	11
38	Sulawesi Tenggara	10	1	11
39	Sulawesi Utara	10	1	11
40	Sulawesi Selatan	10	1	11
41	Sulawesi Tengah	10	1	11
42	Sulawesi Tenggara	10	1	11
43	Sulawesi Utara	10	1	11
44	Sulawesi Selatan	10	1	11
45	Sulawesi Tengah	10	1	11
46	Sulawesi Tenggara	10	1	11
47	Sulawesi Utara	10	1	11
48	Sulawesi Selatan	10	1	11
49	Sulawesi Tengah	10	1	11
50	Sulawesi Tenggara	10	1	11
51	Sulawesi Utara	10	1	11
52	Sulawesi Selatan	10	1	11
53	Sulawesi Tengah	10	1	11
54	Sulawesi Tenggara	10	1	11
55	Sulawesi Utara	10	1	11
56	Sulawesi Selatan	10	1	11
57	Sulawesi Tengah	10	1	11
58	Sulawesi Tenggara	10	1	11
59	Sulawesi Utara	10	1	11
60	Sulawesi Selatan	10	1	11
61	Sulawesi Tengah	10	1	11
62	Sulawesi Tenggara	10	1	11
63	Sulawesi Utara	10	1	11
64	Sulawesi Selatan	10	1	11
65	Sulawesi Tengah	10	1	11
66	Sulawesi Tenggara	10	1	11
67	Sulawesi Utara	10	1	11
68	Sulawesi Selatan	10	1	11
69	Sulawesi Tengah	10	1	11
70	Sulawesi Tenggara	10	1	11
71	Sulawesi Utara	10	1	11
72	Sulawesi Selatan	10	1	11
73	Sulawesi Tengah	10	1	11
74	Sulawesi Tenggara	10	1	11
75	Sulawesi Utara	10	1	11
76	Sulawesi Selatan	10	1	11
77	Sulawesi Tengah	10	1	11
78	Sulawesi Tenggara	10	1	11
79	Sulawesi Utara	10	1	11
80	Sulawesi Selatan	10	1	11
81	Sulawesi Tengah	10	1	11
82	Sulawesi Tenggara	10	1	11
83	Sulawesi Utara	10	1	11
84	Sulawesi Selatan	10	1	11
85	Sulawesi Tengah	10	1	11
86	Sulawesi Tenggara	10	1	11
87	Sulawesi Utara	10	1	11
88	Sulawesi Selatan	10	1	11
89	Sulawesi Tengah	10	1	11
90	Sulawesi Tenggara	10	1	11
91	Sulawesi Utara	10	1	11
92	Sulawesi Selatan	10	1	11
93	Sulawesi Tengah	10	1	11
94	Sulawesi Tenggara	10	1	11
95	Sulawesi Utara	10	1	11
96	Sulawesi Selatan	10	1	11
97	Sulawesi Tengah	10	1	11
98	Sulawesi Tenggara	10	1	11
99	Sulawesi Utara	10	1	11
100	Sulawesi Selatan	10	1	11
TOTAL		310	110	420

Gambar 3. Rekapitulasi data pers oleh Dewan Pers Tahun 2010

**REKAPITULASI DATA PERS CETAK  
TAHUN 2014**

No	Provinsi	malam	Wingpan	Bulan	Jumlah
1	Aceh	3	3		5
2	Sulawesi Utara	21	4		25
3	Sulawesi Barat	7	9	1	17
4	Bali	14	6		20
5	Kepulauan Riau	4	2		6
6	Jambi	8			8
7	Bengkulu	7	3		10
8	Sulawesi Selatan	23	11	13	51
9	Bangka Belitung	7			7
10	Lampung	16	9		25
11	Banten	3	2		5
12	DKI Jakarta	12	65	89	166
13	Jawa Barat	10	10	5	25
14	Jawa Tengah	10	3		13
15	Yogyakarta	6	2	3	11
16	Jawa Timur	22	38	6	66
17	Bali	12	2	2	16
18	Nusa Tenggara Barat	7	1		8
19	Nusa Tenggara Timur	4	1		5
20	Kalimantan Barat	7		1	8
21	Kalimantan Selatan	7	4	1	12
22	Kalimantan Tengah	7	2	1	10
23	Kalimantan Timur	4		2	6
24	Sulawesi Selatan	9	5	10	24
25	Sulawesi Tenggara	5			5

Data Pers Nasional 2014 | 35

**REKAPITULASI DATA MEDIA PENYIARAN DAN SIBER  
TAHUN 2014**

No	Provinsi	Radio	Televisi	Siber	Jumlah
1	Aceh	26	6	4	36
2	Sulawesi Utara	56	13	9	78
3	Sulawesi Barat	35	13	4	52
4	Bali	29	11	3	43
5	Kepulauan Riau	18	13	3	34
6	Jambi	23	9	4	36
7	Bengkulu	13	4	4	21
8	Sulawesi Selatan	28	16	3	47
9	Bangka Belitung	21	3	5	29
10	Lampung	40	12	10	62
11	Banten	37	5	5	47
12	DKI Jakarta	80	40	64	184
13	Jawa Barat	151	30	5	186
14	Jawa Tengah	176	16	2	194

Data Pers Nasional 2014

15	DIY	38	12	5	55
16	Jawa Timur	130	13	15	158
17	Bali	60	14	6	80
18	Nusa Tenggara Barat	14	10	1	25
19	Nusa Tenggara Timur	28	7	12	47
20	Kalimantan Barat	20	11	2	33
21	Kalimantan Selatan	37	26	5	68
22	Kalimantan Tengah	35	16	1	52
23	Kalimantan Timur	51	22	8	76
24	Sulawesi Selatan	20	15	5	40
25	Sulawesi Tenggara	38	5	5	48
26	Sulawesi Tengah	5	11	2	18
27	Gorontalo	3	4	2	9
28	Sulawesi Utara	17	13	12	42
29	Sulawesi Barat	2	1	2	5
30	Maluku	5	9	1	15
31	Maluku Utara	2	3	1	6
32	Papua	3	9	3	15
33	Papua Barat	3	2	1	6
34	Kalimantan Utara	0	0	0	0
Total		1166	394	211	1771

Gambar 4. Rekapitulasi data pers oleh Dewan Pers Tahun 2014

## DAFTAR TABEL

### Data Perusahaan Pers Cetak dan Elektronik rentang tahun 2010-2014<sup>1</sup>

Tahun 2010				Tahun 2014	
NO	Provinsi	Cetak	Elektronik	Cetak	Elektronik
1	NAD	8	20	5	32
2	Sumatera Utara	82	7	25	72
3	Sumatera barat	26	21	17	48
4	Riau	23	12	20	40
5	Kepulauan Riau	9	0	8	31
6	Jambi	17	3	8	29
7	Bengkulu	5	6	10	17
8	Sumatera Selatan	29	26	51	44
9	Bangka Belitung	6	8	7	24
10	Lampung	30	3	19	52
11	Banten	18	8	8	42
12	DKI Jakarta	323	42	130	80
13	Jawa Barat	41	7	30	183
14	Jawa tengah	20	19	18	192
15	D.I. Yogyakarta	16	24	11	50
16	Jawa Timur	72	98	63	143
17	Bali	18	10	16	74
18	NTT	11	5	8	24
19	NTB	10	31	5	35
20	Kalimantan Barat	11	14	8	31
21	Kalimantan Selatan	24	45	12	63
22	Kalimantan Tengah	19	11	10	31
23	Kalimantan Timur	12	10	6	73
24	Sulawesi Selatan	73	31	24	35
25	Sulawesi Tenggara	7	13	5	23
26	Sulawesi Tengah	4	4	6	16
27	Gorontalo	5	1	2	7
28	Sulawesi Utara	11	4	10	30
29	Sulawesi Barat	1	0	1	3
30	Maluku	6	9	7	14
31	Maluku Utara	4	0	2	5
32	Papua	8	4	5	12
33	Papua Barat	2	0	7	5
	<b>Total</b>	<b>952</b>	<b>496</b>	<b>566</b>	<b>1560</b>

<sup>1</sup> Data Rekapitulasi Perusahaan Pers per 1 tahun yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

## **BAB II**

### **ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS**

#### **Pasal 2**

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

#### **Pasal 3**

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

#### **Pasal 4**

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

#### **Pasal 5**

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

#### **Pasal 6**

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;



### **BAB III WARTAWAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

### **BAB IV PERUSAHAAN PERS**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

#### **Pasal 10**

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

#### **Pasal 11**

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

#### **Pasal 12**

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

#### **Pasal 13**

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

#### **Pasal 14**

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

## **BAB V DEWAN PERS**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
  - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
  - g. mendata perusahaan pers;
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
  - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
  - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
  - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
  - a. organisasi pers;
  - b. perusahaan pers;
  - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

## **BAB VI PERS ASING**

### **Pasal 16**

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 17**

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
  - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**BACHARUDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 September 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**MULADI**

### **LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Plt

Edy Sudibyo

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERS**

**I. UMUM**

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas

#### **Ayat (2)**

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

### **Pasal 4**

#### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

**Ayat (2)**

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

**Pasal 8**

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan



perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas

#### **Pasal 10**

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

#### **Pasal 11**

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Cukup jelas

### **Pasal 14**

Cukup jelas

### **Pasal 15**

#### **Ayat (1)**

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

#### **Ayat (2)**

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

#### **Ayat (3)**

Cukup jelas

#### **Ayat (4)**

Cukup jelas

#### **Ayat (5)**

Cukup jelas

#### **Ayat (6)**

Cukup jelas

**Ayat (7)**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

**Pasal 18**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENYIARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- e. bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru;

Mengingat:

1. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
4. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
5. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
6. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
7. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran,

- dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
8. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
  9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  11. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional.
  12. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
  13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
  14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

## **BAB II ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH**

### **Pasal 2**

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

### **Pasal 3**

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

### **Pasal 4**

1. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

### **Pasal 5**

Penyiaran diarahkan untuk:

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;

- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.

### **BAB III PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

#### **Bagian Pertama Umum**

##### **Pasal 6**

1. Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
2. Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
4. Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

#### **Bagian Kedua Komisi Penyiaran Indonesia**

##### **Pasal 7**

1. Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
2. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
3. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
4. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

##### **Pasal 8**

1. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan standar program siaran;
  - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
  - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
3. KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
  - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
  - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;



- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

#### **Pasal 9**

1. Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
2. Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
3. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
6. Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 10**

1. Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
  - g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
  - h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
  - i. bukan pejabat pemerintah; dan
  - j. nonpartisan.
2. Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
3. Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
4. Anggota KPI berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 11**

1. Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
2. Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
3. Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

## **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

## **Bagian Ketiga Jasa Penyiaran**

## **Pasal 13**

1. Jasa penyiaran terdiri atas:
  - a. jasa penyiaran radio; dan
  - b. jasa penyiaran televisi.
2. Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Lembaga Penyiaran Publik;
  - b. Lembaga Penyiaran Swasta;
  - c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
  - d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

## **Bagian Keempat Lembaga Penyiaran Publik**

## **Pasal 14**

1. Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
2. Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.
3. Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.
4. Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
6. Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.
7. Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
8. Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
9. Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

## **Pasal 15**

1. Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari:
  - a. iuran penyiaran;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan; dan
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
2. Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

## **Bagian Kelima Lembaga Penyiaran Swasta**

### **Pasal 16**

- 1. Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- 2. Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

### **Pasal 17**

- 1. Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- 2. Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- 3. Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

### **Pasal 18**

- 1. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
- 2. Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.
- 3. Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

### **Pasal 19**

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

- a. siaran iklan; dan/atau
- b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

### **Pasal 20**

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

## **Bagian Keenam Lembaga Penyiaran Komunitas**

### **Pasal 21**

1. Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
2. Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan:
  - a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
  - b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggam-barkan identitas bangsa.
3. Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:
  - a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
  - b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
  - c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

### **Pasal 22**

1. Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.
2. Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 23**

1. Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.
2. Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

### **Pasal 24**

1. Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
2. Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Ketujuh Lembaga Penyiaran Berlangganan**

### **Pasal 25**

1. Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

2. Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

#### **Pasal 26**

1. Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
  - a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
  - b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
  - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.
2. (2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:
  - a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
  - b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan
  - c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.
3. (3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari:
  - a. iuran berlangganan; dan
  - b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

#### **Pasal 27**

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
- c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
- d. menggunakan satelit yang mempunyai landing right di Indonesia; dan
- e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

#### **Pasal 28**

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

#### **Pasal 29**

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

### **Bagian Kedelapan Lembaga Penyiaran Asing**

#### **Pasal 30**

1. Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.
2. Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

## **Bagian Kesembilan** **Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran**

### **Pasal 31**

1. Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.
2. Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
3. Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
5. Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.
6. Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

## **Bagian Kesepuluh** **Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan** **Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran**

### **Pasal 32**

1. Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kesebelas** **Perizinan**

### **Pasal 33**

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
3. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
4. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
  - a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
  - b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
  - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
  - d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

5. Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
6. Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
7. Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

#### **Pasal 34**

1. Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
  - a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
3. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
4. Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
5. Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena:
  - a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
  - b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
  - c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
  - d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
  - e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
  - f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

### **BAB IV PELAKSANAAN SIARAN**

#### **Bagian Pertama Isi Siaran**

#### **Pasal 35**

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

#### **Pasal 36**

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
5. Isi siaran dilarang:
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
6. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

## **Bagian Kedua Bahasa Siaran**

### **Pasal 37**

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

### **Pasal 38**

1. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
2. Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

### **Pasal 39**

1. Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarkan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.
2. Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
3. Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

## **Bagian Ketiga Relai dan Siaran Bersama**

### **Pasal 40**

1. Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
2. Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.
3. Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya dibatasi.
4. Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.

### **Pasal 41**



Antarlembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

#### **Bagian Keempat Kegiatan Jurnalistik**

##### **Pasal 42**

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kelima Hak Siar**

##### **Pasal 43**

1. Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
2. Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
3. Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
4. Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keenam Ralat Siaran**

##### **Pasal 44**

1. Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.
2. Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
3. Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

#### **Bagian Ketujuh Arsip Siaran**

##### **Pasal 45**

1. Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
2. Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedelapan Siaran Iklan**

##### **Pasal 46**

1. Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
2. Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

3. Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
  - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
  - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
4. Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
5. Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
6. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
7. Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
8. Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.
9. Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.
10. Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.
11. Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

### **Bagian Kesembilan Sensor Isi Siaran**

#### **Pasal 47**

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

### **BAB V PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN**

#### **Pasal 48**

1. Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
2. Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:
  - a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
3. KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
4. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
  - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
  - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
  - c. kesopanan dan kesusilaan;
  - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
  - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
  - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
  - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
  - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
  - i. siaran langsung; dan
  - j. siaran iklan.
5. KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

#### **Pasal 49**

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### **Pasal 50**

1. KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
2. KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
3. KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
4. KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
5. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

#### **Pasal 51**

1. KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
2. Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

### **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 52**

1. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
2. Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

### **BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 53**

1. KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

#### **Pasal 54**

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

### **BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF**

## **Pasal 55**

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
  - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
  - d. denda administratif;
  - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  - f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
  - g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 56**

1. Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 57**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

### **Pasal 58**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

## **Pasal 59**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 60**

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.
2. Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-undang ini.
3. Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjarangan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 61**

1. KPI harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini.
2. Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### **Pasal 62**

1. Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

### **Pasal 63**

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 64**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2002  
**PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,**

ttd.

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2002  
**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**BAMBANG KESOWO**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

**Lambock V. Nahattands**

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENYIARAN**

## **UMUM**

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran.

Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
3. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
4. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televise kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
5. lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;
6. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
7. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

## **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan pola jaringan yang adil dan terpadu adalah pencerminan adanya keseimbangan informasi antardaerah serta antara daerah dan pusat.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan diawasi adalah pelaksanaan tugas KPI dipantau dan dikontrol agar sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Pedoman perilaku penyiaran tersebut diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan mengawasi pelaksanaan peraturan adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI.

Huruf d  
Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Huruf e



Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud memberikan kesempatan kepemilikan saham adalah pada saat-saat penjualan saham kepada publik.

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan komunitasnya adalah komunitas yang berada dalam wilayah jangkauan daya pancar stasiun komunitas yang diizinkan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan kode etik adalah pedoman perilaku penyelenggaraan penyiaran komunitas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan diutamakan ialah diberikan prioritas kepada masyarakat di daerah itu atau yang berasal dari daerah itu. Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun hanya dapat diberikan kepada pihak dari luar daerah apabila masyarakat setempat tidak ada yang berminat.

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Mata acara siaran yang berasal dari luar negeri diutamakan berkaitan dengan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga, serta hiburan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan harus diberi teks bahasa Indonesia, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Ayat (2)  
Pengaturan tentang film yang boleh disiarkan melalui media televisi disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang perfilman.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembatasan jenis siaran acara tetap adalah acara siaran warta berita, siaran musik yang penampilan tidak pantas, dan acara siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

Ayat (10)  
Cukup jelas

Ayat (11)  
Yang dimaksud dengan sumber daya dalam negeri adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri.

Pasal 47  
Tanda lulus sensor yang dimaksud dalam Pasal ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan hak jawab pada ayat ini sudah termasuk di dalamnya hak koreksi dan hak pembetulan atas kesalahan.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan pemantauan Lembaga Penyiaran adalah melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran.  
Yang dimaksud dengan kegiatan literasi adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Presiden mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Gubernur mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI Daerah.

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252**



PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

Pengurus Pusat

ALAMAT/ADDRESS : GEDUNG DEWAN PERS, LT. IV, JALAN KEBUN SIRIH 34, JAKARTA 10110, INDONESIA, TEL. : 345.3131, 386.2041 FAX. (021) 345.3175

Nomor : 524/PWI-P/LIII/99  
Hal : Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)  
Lamp. : 1 (satu) set.

11 Agustus 1999

Yang terhormat,  
Segecap Pengurus PWI Cabang & Perwakilan  
di - seluruh Indonesia.

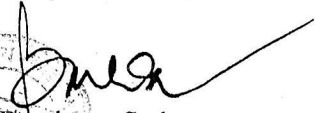
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara, "Kode Etik Wartawan Indonesia" (KEWI) yang baru, yang telah disahkan oleh organisasi-organisasi wartawan, dalam rapat koordinasi dengan Dewan Pers, tanggal 5-7 Agustus 1999 di Bandung.

PWI Pusat menjelaskan kepada Saudara bahwa secara internal, *PWI juga tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI*, yang telah disempurnakan dalam Kongres XX PWI, 10-11 Oktober 1998 di Semarang.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara. Terima kasih.

Persatuan Wartawan Indonesia  
Pengurus Pusat,

  
Bambang Sadono  
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Yth. Segecap PP.PWI.
2. Yth. Dewan Kehormatan PWI.
3. arsip.

## Kode Etik Wartawan Indonesia

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik :

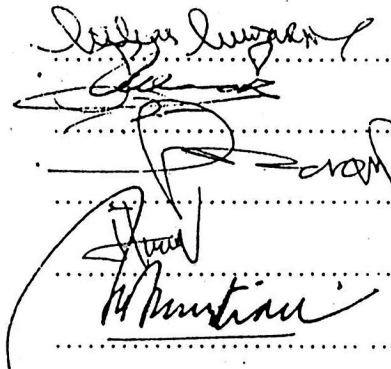
1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh Organisasi yang dibentuk untuk itu.

Bandung, 6 Agustus 1999


Kami atas nama organisasi wartawan Indonesia :


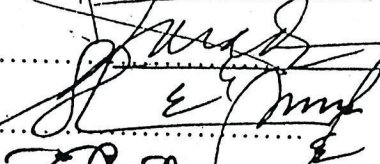

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1. A J I   | Lukas Luwarso  |
| 2. A L J I | Rendy Soekamto |
| 3. A W A M | Qohari Khalil  |
| 4. A W E   | Rusyanto       |
| 5. HIPS I  | M.A. Nasution  |

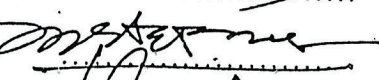
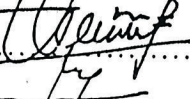
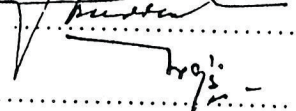



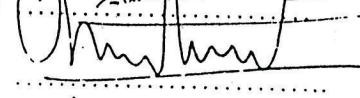


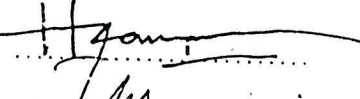
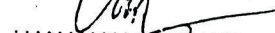
- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 6. HIPWI            | R.E. Hermawan, S         |
| 7. HIWAMI           | H. Erwin Amril           |
| 8. HPPI             | H. Sutomo Parastho       |
| 9. IJTI             | Achmad Zihni Rifai       |
| 10. IPPI            | Eddy Syahron Purnama     |
| 11. IWAR I          | Ferdinad R.              |
| 12. I W I           | Rosihan Sinulingga       |
| 13. KEWADI          | M. Suprpto, S            |
| 14. KO-WAPPI        | Hans Max Kawengian       |
| 15. K O W R I       | H. Lahmuddin B. Nasution |
| 16. K W I           | Arsyid Silazim           |
| 17. K W R I         | R. Priyo M. Ismail       |
| 18. PEWARPI         | Andi Amiruddin M         |
| 19. P J I           | Darwin Hulalata          |
| 20. P W F I         | H.M. Sampelan            |
| 21. P W I           | Tarman Azzam             |
| 22. SEPERNAS        | G. Rusly                 |
| 23. SERIKAT PEWARTA | Maspendi                 |
| 24. SOMPRI          | Yayan R.                 |
| 25. SWAMI           | H. Ramlan M.             |
| 26. S W I I         | KRMH. Gunarso G.K.       |


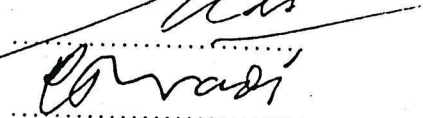
  
.....

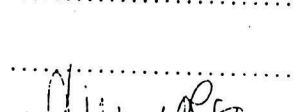
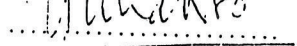
  
.....  
  
.....  
  
.....

  
.....  
  
.....  
  
.....

  
.....  
  
.....

  
.....  
  
.....

  
.....  
  
.....

  
.....  
  
.....

**KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI  
DEWAN PERS DENGAN ORGANISASI WARTAWAN  
BANDUNG, 5 – 7 AGUSTUS 1999**

---

**PENDAHULUAN.**

Rapat Koordinasi Dewan Pers dengan Organisasi Wartawan berlangsung di Bandung pada tanggal 5 – 7 Agustus 1999, dengan tema “*Mewujudkan Kebebasan Pers secara profesional Berdasarkan Kode Etik Wartawan Indonesia*”, dan bertujuan :

1. Membahas dan untuk mensahkan Kode Etik Wartawan Indonesia.
2. Membahas dan menyempurnakan Penafsiran Kode Etik Wartawan Indonesia.
3. Membahas tentang lembaga yang akan melaksanakan pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia.
4. Membahas perencanaan sosialisasi Kode Etik Wartawan Indonesia.

Rapat Koordinasi diikuti oleh Pelaksana Harian Dewan Pers, Komisi-komisi Teknis Dewan Pers dan Organisasi-organisasi wartawan seperti terlampir.

Rapat Koordinasi telah mendengar dan membahas :

1. Sambutan Wakil Ketua/Ketua Pelaksana Harian Dewan Pers;
2. Laporan Sekretaris Dewan Pers/Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika;
3. Pemaparan Rancangan Kode Etik Wartawan Indonesia dan penafsirannya oleh Ketua Tim Perumus, R.H. Siregar, SH.
4. Pemandangan Umum Peserta Rapat Koordinasi Dewan Pers dengan Organisasi Wartawan.

Rapat Koordinasi telah mencapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mensahkan Rancangan Kode Etik Wartawan Indonesia menjadi Kode Etik Wartawan Indonesia.
2. Membentuk Tim Perumus yang terdiri dari Tim Perumus lama ditambah wakil-wakil dari Serikat Pewarta, AWAM dan KWRI untuk menyempurnakan rumusan Rancangan Penafsiran Kode Etik Wartawan Indonesia.
3. Meminta masukan dari setiap Organisasi Wartawan Indonesia untuk menyempurnakan rancangan Penafsiran Kode Etik Wartawan Indonesia dalam waktu 1 (satu) minggu setelah Rapat Koordinasi ini.
4. Dalam waktu paling lambat 2 ( dua ) minggu setelah Rapat Koordinasi ini agar diselenggarakan Rapat Tim Perumus rancangan penyempurnaan Penafsiran Kode Etik Wartawan Indonesia di Jakarta.
5. Kode Etik Wartawan Indonesia yang telah disahkan dalam Rapat Koordinasi ini agar di sosialisasikan kepada masyarakat luas, secara internal oleh masing-masing organisasi wartawan dan secara eksternal oleh Departemen Penerangan RI.

Bandung, 6 Agustus 1999

TIM PERUMUS :

Lukas Luwarso  
Tarman Azzam  
Lahmuddin Bakry Nasution  
Rendy Soekamto  
Drs. M.A. Nasution  
Drs. G. Rusly  
Drs. J.B. Wahyudi  
R.H. Siregar, SH  
H. Dailami .

## **RIWAYAT HIDUP**



Handoko Fincensius, Lahir di Jakarta pada 3 Januari 1994. Menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Pulogadung 09 tahun 2006, SMP Negeri 74 Jakarta tahun 2009, dan SMK Negeri 40 Jakarta pada tahun 2012. Penulis berkesempatan melanjutkan kuliah setelah lulus ujian jalur SNMPTN Tulis pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta tahun 2012.

Selama kuliah di Universitas Negeri Jakarta, penulis aktif di BEM Sejarah sebagai Wakadiv. Kerohanian periode 2013-2014, dan aktif sebagai anggota Divisi Pendidikan Solidaritas Pemuda Rawamangun periode 2017- sekarang. Penulis pernah mengikuti sebuah kegiatan sosial bernama “Teras Cerdas”, yaitu kegiatan bimbingan belajar gratis kepada anak-anak SMP di Pondok Ungu, Bekasi pada tahun 2014-2015.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hasil penelitian skripsi ini. Apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini, maka penulis dapat dihubungi melalui email [handokofincensius@rocketmail.com](mailto:handokofincensius@rocketmail.com) atau nomor Whatsapp 082299158834.